

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II
2024



PANGKALAN PSDKP TUAL

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



psdkp.tual@kkp.go.id



[psdkp.tual](https://www.instagram.com/psdkp.tual)



www.kkp.go.id/pangkalantual

Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan II Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan II Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual (UPT Pangkalan PSDKP Tual)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Pangkalan PSDKP Tual dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Pangkalan PSDKP Tual dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tual, 11 Juli 2024

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Sigit Bintoro, S.Pi

NIP. 19621022 199803 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Triwulan II tahun 2024.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Pangkalan PSDKP Tual bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif;
2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas;
7. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas;
8. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai NKO 108,85. Selama Triwulan II Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan perhitungan atas capaian 14 indikator

kinerja, dimana 11 indikator lainnya belum dilaksanakan perhitungan dan baru akan dihitung secara tahunan sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 14 indikator kinerja:

1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks) dengan target 50 dan capaian sebesar 100;
2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 94,35;
3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 98,29;
4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
5. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
6. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
7. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks) dengan target 60 dan capaian sebesar 80;
8. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks) dengan target 50 dan capaian sebesar 60;
9. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
10. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dengan target 77 dan capaian 83,09;
11. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan target 80% dan capaian sebesar 80%;
12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dengan target 80 dan capaian 100; dan
13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dengan target 94% dan capaian sebesar 133,33%;

14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dengan target 82 dan capaian sebesar 86,53.

Realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 19,37% atau sebesar Rp**13.696.631.691,-** (*Tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah*) dari alokasi anggaran Rp**70.706.563.000,-** (*Tujuh puluh miliar tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), dimana terdapat PNBPN pada TA. 2024 sebesar Rp**34.452.359.000,-** (*Tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*), yang hingga Triwulan II berakhir masih terblokir. Jika dihitung berdasarkan pagu existing selama Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp**36.254.204.000,-** maka realisasi selama Triwulan II tahun 2024 sebesar 37,77%. Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan sehingga pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya dapat dipenuhi secara maksimal.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Maksud dan Tujuan.....	10
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10
D. Data Umum Organisasi	11
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	16
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024.....	17
B. Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2020 – 2024	19
C. Program Kerja Pengawasan SDKP	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
E. Pengukuran Capaian Kinerja	23
BAB III	25
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024 25	
1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2024.....	25
2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2024 Tahunan.....	25
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	28
1. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	28
2. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	42
3. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan.....	96
4. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	114
5. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	120
C. Realisasi Anggaran	128

BAB IV..... 129

PENUTUP..... 129

 A. Kesimpulan..... 129

 B. Saran dan Rekomendasi..... 129

Daftar Tabel

Tabel 1 Data Armada.....	15
Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja	15
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2024	21
Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2024.....	26
Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2024	28
Tabel 6 Capaian IK 2.....	33
Tabel 7 Perhitungan capaian IKU 2.....	34
Tabel 8 Capaian IKU 3	37
Tabel 9 Perhitungan capaian IKU 3.....	38
Tabel 10 Realisasi armada speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Tual	39
Tabel 11 Capaian IK 4.....	41
Tabel 12 Tahapan pemeriksaan IKU 5	44
Tabel 13 Capaian IKU 5	44
Tabel 14 Rekap pemeriksaan SDK Triwulan II	47
Tabel 15 Rekap Pengawasan Pencemaran.....	48
Tabel 16 Kawasan konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikelola lingkup Pangkalan PSDKP Tual	67
Tabel 17 Data Pengawasan KKPN	69
Tabel 18 Rekap Pengawasan PRL.....	76
Tabel 19 Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi	84
Tabel 20 Rekap pengawasan PWP3K.....	91
Tabel 21 Rekap pengawasan DF	93
Tabel 22 Pemeriksaan IKU 6	96
Tabel 23 Capaian IK 6.....	97
Tabel 24 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan	99
Tabel 25 Rekapitulasi penerbitan SLO Triwulan II.....	100
Tabel 26 Pengawasan penangkapan kapal perikanan.....	102
Tabel 27 Rekap Pengawasan Pengolahan	106
Tabel 28 Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran	109
Tabel 29 Rekap pengawasan budidaya	110
Tabel 30 Rekapitulasi pengawasan LKR	113
Tabel 31 Capaian IK 9.....	115
Tabel 32 Rekap pengenaan sanksi administratif berdasarkan ekspose.....	116
Tabel 33 Rekapitulasi SPKP	118
Tabel 34 Capaian IK 10.....	118
Tabel 35 Capaian IK 20.....	125
Tabel 36 Capaian IK 13.....	121
Tabel 37 Capaian IK 17.....	124
Tabel 38 Capaian IK 21.....	127
Tabel 39 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Tahun 2024.....	129

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual.....	13
Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.....	14
Gambar 3 Sistematisa Penyusunan Lkj Pangkalan PSDKP Tual.....	16
Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual	25
Gambar 5 Pengawasan perizinan berusaha sektor penangkapan ikan	106
Gambar 6 Pengawasan perizinan berusaha sektor pengolahan ikan	108
Gambar 7 Pengawasan pendistribusian ikan.....	108
Gambar 8 Pengawasan budidaya	112
Gambar 9 Pengawasan distribusi LKR.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Pangkalan PSDKP Tual;
- b. Adanya dugaan kegiatan *transshipment* di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPRL.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih banyak UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

4. Bidang pengelolaan sumber daya kelautan

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*.
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
- e. Ketidaksiesuaian Lokasi pemanfaatan ruang laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan PSDKP Tual menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;

- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Pangkalan:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sesuai Peraturan MENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka untuk membantu tugas Kepala Subbagian Umum maka dibentuklah tim kerja pada lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang terdiri atas

1. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
2. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran;
4. Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas.

c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP:

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 5 Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



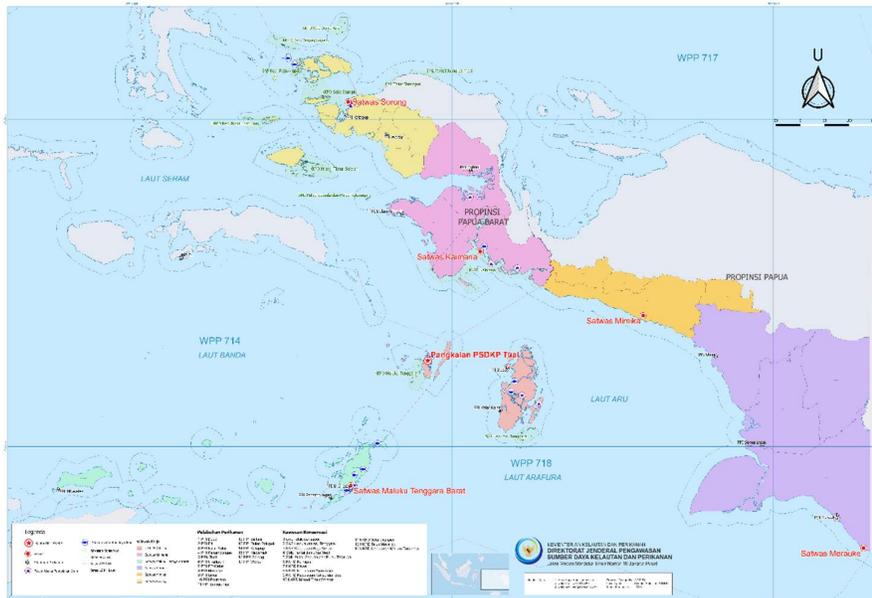
Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 3 Propinsi (Maluku, Papua dan Papua Barat) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni :

- a. WPP 714, meliputi perairan Laut Banda
- b. WPP 715, meliputi perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Teluk Bintuni
- c. WPP 718, meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual membawahi 5 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Wilker PSDKP Dobo
- 2) Wilker PSDKP Warabal
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat (MTB)
 - Wilker PSDKP Kisar
- 4) Satuan Pengawasan SDKP Sorong
 - Wilker PSDKP Sorong Selatan
 - Wilker PSDKP Raja Ampat
- 5) Satuan Pengawasan SDKP Kaimana
 - Wilker PSDKP Fak Fak
 - Wilker PSDKP Wimro / Teluk Bintuni
 - Wilker PSDKP Avona
- 6) Satuan Pengawasan SDKP Mimika
- 7) Satuan Pengawasan SDKP Merauke
 - Wilker PSDKP Wanam
 - Wilker PSDKP Asmat

4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual

Pangkalan PSDKP Tual dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data sebaran kapal pengawas, *speedboat* pengawas, RIB, dan jetski sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1 Data Armada

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Pangkalan
1	Hiu 14	32 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
2	Hiu Macan 06	36 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
3	Sea Rider	8 meter	Pangkalan PSDKP Tual
4	Rubber Boat	5 meter	Wilker Raja Ampat
5	Albacore 002	16 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
6	Napoleon 025	12 Meter	Satwas SDKP Mimika
7	Napoleon 042	12 Meter	Wilker Raja Ampat
8	Napoleon 049	12 Meter	Wilker PSDKP Warabal
9	Napoleon 050	12 Meter	Satwas SDKP MTB
10	Napoleon 018	12 Meter	Satwas SDKP Sorong
11	Marlin 014	6 Meter	Wilker PSDKP Fak Fak
12	Jetski 1	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
13	Jetski 2	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual

Armada Kapal Pengawas, *Speedboat* dan RIB siap operasi

Sumber: Bagian Operasi Armada Pangkalan PSDKP Tual

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sampai Tahun 2024 sebanyak 151 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 86 orang, 5 orang PPPK dan tenaga kontrak sebanyak 51 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS Pusat	PPPK	Tenaga Kontrak	Jumlah (Orang)
1	Pangkalan Pengawasan SDKP Tual	27	7	22	56
	- Wilker Pengawasan SDKP Dobo	2	3	3	8
	- Wilker Pengawasan SDKP Warabal	0	-	2	2
2	Satuan Pengawasan SDKP Sorong	7	-	3	10
	- Wilker Pengawasan SDKP Sor Sel	-	-	-	-
	- Wilker Pengawasan SDKP Raja Ampat	2	-	1	3
3	Satwas Pengawasan SDKP Merauke	9	-	2	11

	- Wilker Pengawasan SDKP Wanam	-	-	-	-
4	Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat	3	-	1	4
	- Wilker Pengawasan SDKP Kisar	-	-	-	-
5	Satuan Pengawasan SDKP Kaimana	2	-	3	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Wimro	-	-	1	1
	- Wilker Pengawasan SDKP Fak Fak	2	-	2	4
6	Satuan Pengawasan SDKP Mimika	4	-	2	6
	- Wilker Pengawasan SDKP Asmat	-	-	-	-
7	KP. Hiu Macan 06	14	-	3	17
8	KP. Hiu 14	8	-	1	9
9	KP. Orca 3	-	1	-	1
10	Tugas Belajar	4	-	-	4
	Total	84	11	46	141

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Pangkalan PSDKP Tual

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan Lkj Pangkalan PSDKP Tual

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020 - 2024; ⁽²⁾Manual Indikator Kinerja Tahun 2024; ⁽³⁾Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024; ⁽⁴⁾Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 - 2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2020 – 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

"Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan"

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan

perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

B. Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2020 – 2024

UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan dengan cara memadukan kebijakan pusat dan UPT Pangkalan PSDKP Tual adalah pemokus kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

Sasaran : Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

C. Program Kerja Pengawasan SDKP

1. Program

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 2020 – 2024 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Tual.

Selain kegiatan di atas Pangkalan PSDKP Tual juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Tual dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
SK. 2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	02	Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	91
		03	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	91
		04	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100%
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	05	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP	100

			Tual (Nilai)	
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	06	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	100
SK. 5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	07	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100%
		08	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual(%)	100%
SK. 6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	09	Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	80
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	93
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	75
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	70
		15	Indeks profesionalitas ASN lingkup	82

			UPT Pangkalan PSDKP Tual	
		16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	84
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%
		18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	21
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
		20	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	80
		21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	94%
		22	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	80%
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	80%
		24	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	93,76
		25	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	82

E. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual

Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

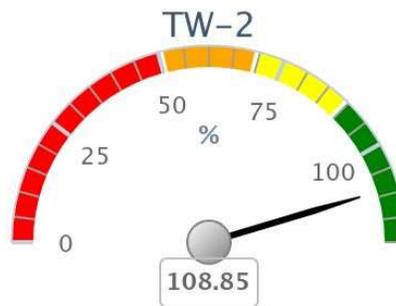
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024, Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IKU dan 14 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Pangkalan PSDKP Tual sebesar 108,85% untuk Triwulan II, capaian dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan PSDKP Tual dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 25 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2024 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target JUNI	Capaian JUNI	%
S.01	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif					120	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	50	100	120
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif					103,34	
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	94,35	103,68
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	98,29	108,01
4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100
S.03	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan					100	
5	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan					100	
6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100
S.05	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
7	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	%	Maximize	Akumulasi	0		
8	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual(%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		
S.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas					120	
9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	60	80	120
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	50	60	120
S.07	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas						
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		
S.08	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					109,74	
12	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		
13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100

14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		
15	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	83,09	107,91
16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100
18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		
19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		
20	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	100	120
21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	133,33	120
22	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		
23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		
24	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	86,53	105,52
25	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0		

Pada Triwulan II tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual menetapkan 25 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 14 IK dilaksanakan dengan kriteria 9 IK dengan predikat baik, 5 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang Triwulan II tahun 2024. Realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 19,37% atau sebesar Rp**13.696.631.691,-** (*Tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah*) dari alokasi anggaran Rp**70.706.563.000,-** (*Tujuh puluh miliar tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), dimana terdapat PNPB pada TA. 2024 sebesar Rp**34.452.359.000,-** (*Tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*), yang hingga Triwulan II berakhir masih terblokir. Jika dihitung berdasarkan pagu existing selama Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp**36.254.204.000,-** maka realisasi selama Triwulan II tahun 2024 sebesar 37,77%.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2024

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	PAGU	0	44,525,012,000	1,839,700,000	0	0	0	0	0	0	46,364,712,000
		REALISASI	0.00%	2,112,977,309 (4.75%)	943,746,000 (51.30%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,056,723,309 (6.59%)
		SISA	0	42,412,034,691	895,954,000	0	0	0	0	0	0	43,307,988,691
2	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	PAGU	0	441,000,000	0	0	0	0	0	0	0	441,000,000
		REALISASI	0.00%	195,889,623 (44.42%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	195,889,623 (44.42%)
		SISA	0	245,110,377	0	0	0	0	0	0	0	245,110,377
3	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	PAGU	0	1,290,000,000	83,000,000	0	0	0	0	0	0	1,373,000,000
		REALISASI	0.00%	377,562,122 (29.27%)	74,500,000 (89.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	452,062,122 (32.93%)
		SISA	0	912,437,878	8,500,000	0	0	0	0	0	0	920,937,878
4	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	PAGU	0	1,752,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	1,770,000,000
		REALISASI	0.00%	225,796,629 (12.89%)	17,498,000 (97.21%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	243,294,629 (13.75%)
		SISA	0	1,526,203,371	502,000	0	0	0	0	0	0	1,526,705,371
5	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Diijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PAGU	11,894,652,000	8,613,199,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	20,757,851,000
		REALISASI	6,344,712,140 (53.34%)	3,403,929,868 (39.52%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,748,642,008 (46.96%)
		SISA	5,549,939,860	5,209,269,132	250,000,000	0	0	0	0	0	0	11,009,208,992
GRAND TOTAL		PAGU	11,894,652,000	56,621,211,000	2,190,700,000	0	0	0	0	0	0	70,706,563,000
		REALISASI	6,344,712,140 (53.34%)	6,316,175,551 (11.16%)	1,035,744,000 (47.28%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	13,696,631,691 (19.37%)
		SISA	5,549,939,860	50,305,035,449	1,154,956,000	0	0	0	0	0	0	57,009,931,309

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 11 indeks kinerja yang dapat dicapai oleh Pangkalan PSDKP Tual pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Sasaran kegiatan ini menghasilkan 1 indikator kinerja utama yaitu "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)". Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual sejak tahun 2023 dan berlangsung hingga tahun 2024.

a. IKU 1: Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS yang telah dilaksanakan dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS. Perhitungan tercapainya indikator kinerja dimaksud antara lain dengan melihat komponen penilaian POKMASWAS antara lain

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Capaian keberhasilan indikator kinerja dapat diformulakan sebagai berikut :

$$x = \frac{(a + b + c)}{100}$$

Keterangan:

x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)

b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Rumah Aspirasi Kabupaten Merauke, merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2024, dengan total kehadiran sebanyak 100 orang peserta dengan rincian 60 orang berasal dari Distrik Urumb dan 40 orang berasal dari Desa Kelapa Lima. Pelaksanaan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual dengan memenuhi ketiga komponen penilaian indeks kualitas pembinaan POKMASWAS, sehingga indikator kinerja ini berhasil memperoleh **capaian 100%** dari **target semester I sebesar 50%**. Capaian indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks), kami sampaikan dalam tabel berikut.

Tabel 6 Capaian IK 1

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2024	2024	TW II 2024	s/d TW II 2023	TW II 2023
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	50	81	100	100	-

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Pangkalan PSDKP Tual telah menyelesaikan pembinaan POKMASWAS dengan capaian melebihi target semester I bahkan target tahunan. Pembinaan POKMASWAS dengan target 1 kelompok telah selesai dilaksanakan dan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan triwulan tahun sebelumnya, walaupun indikator kinerja ini telah dilaksanakan sejak tahun 2023, akan tetapi terdapat perbedaan periode penilaian dimana pada tahun 2023 dilakukan penilaian secara tahunan, dan pada tahun

2024 dilakukan setiap semester atau pada triwulan II. Realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS sebesar Rp99,998,608 atau 99,99%.

Analisa penyebab keberhasilan, ada beberapa faktor yang menyebabkan indikator kinerja ini dapat terselenggara secara optimal antara lain;

1. Melakukan perencanaan dan pembentukan panitia dengan segera. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun lalu maka Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual tahun ini dilaksanakan lebih awal dengan dibentuknya panitia agar lebih memudahkan perencanaan dan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan;
2. Komunikasi eksternal. Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS tahun 2024, tidak hanya dilaksanakan dengan hanya melibatkan Pangkalan PSDKP Tual semata melainkan juga pihak lain diantaranya Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan yang dalam hal ini dihadirkan sebagai pemateri. Keterlibatan pihak eksternal mengharuskan penyelenggara harus proaktif dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak baik dengan pemateri, peserta, dan para undangan sehingga tujuan kegiatan dapat berjalan dengan optimal;

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan, terdapat beberapa kegiatan yang bersinggungan langsung dan menunjang keberhasilan indikator kinerja pembinaan POKMASWAS antara lain;

1. Perencanaan, sebagai dasar setiap kegiatan maka perencanaan adalah kegiatan salah satu faktor keberhasilan, dimana perencanaan yang telah tertuang pada RKA Pangkalan PSDKP Tual tahun 2024 dimatangkan kembali dengan diadakannya rapat panitia pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS. Perencanaan tidak hanya berfokus pada anggaran sebagaimana yang tertuang pada RKA tapi lebih jauh dari itu diperdalam terkait jumlah peserta, pemateri, lokasi kegiatan, logistik, akomodasi, undangan dan konsep acara.
2. Informasi pengawasan, dari informasi yang didapatkan terkait pengawasan yang dijalankan baik dari Satwas SDKP Merauke sebagai perpanjangan tangan dan perwakilan Pangkalan PSDKP Tual, dan rekan-rekan dinas Provinsi maupun kota didapati kelompok Masyarakat pengawas yang aktif pada wilayah Merauke dan keterlibatan mereka selama ini dalam kegiatan pengawasan yang terjadi di provinsi Papua Selatan, terkait adanya dugaan pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan informasi ini Pangkalan PSDKP Tual menetapkan Merauke menjadi tempat dilaksanakannya pembinaan POKMASWAS.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Sasaran Kegiatan kedua menghasilkan 3 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual diantaranya;

1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

Kondisi ini tidak berbeda dengan penetapan perjanjian kinerja pada tahun 2023. Penjabaran sasaran kegiatan pada 3 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Pangkalan PSDKP Tual dalam melakukan pengelolaan terhadap armada yaitu Kapal Pengawas Hiu Macan 06 dan Kapal Pengawas Hiu 14, dalam melakukan pengawasan pada WPPNRI 714, 715, dan 718.

b. IKU 2: Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)

Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai untuk menentukan sejauh mana Pangkalan PSDKP Tual mengoptimalkan armada pengawasan dalam hal ini kapal pengawas di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual terutama di WPP NRI 714, 715, dan 718. Secara sederhana dalam informasi indikator kinerja IKU ini didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;

- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas
- Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
- Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
- Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali)]: Bobot 30%, Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]
- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 unit kapal ikan per hari dan 1 objek kelautan per periode operasi.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Selama Triwulan II tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh capaian **94,35** dengan persentasi **103,68%** sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024 dari target Triwulan II sebesar **91**. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 7 Capaian IK 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I 2024	TW II 2024	s/d TW II	TW II 2023
Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	91	91	90,67	94,35	94,35	92,22

Jika dilihat pada tabel yang tersaji di atas maka capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual telah mencapai target. Perhitungan atas capaian indeks kinerja ini kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 8 Perhitungan capaian IKU 2

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Tertarung (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker						
			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II									
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi			Nilai					
7	Pangkalan PSDKP Tual	KP_HIU MACAN 06	54	43	55,74	3	3	30,00	34,30	0,50	0,49	39,80	0	0	60	0	0	0	40	15	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	1	1	40	5	94,10	98,04
		KP_HIU 14	51	66	90,59	3	2	20,00	44,24	0,52	0,49	37,75	0	0	60	0	0	0	40	15	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	40	5	101,99		

Berdasarkan rumus yang telah dijabarkan sebelumnya maka hasil perhitungan yang dijabarkan pada tabel di atas masih harus dilakukan perhitungan rata-rata sebagai berikut;

$$\text{Capaian IKU 2} = \frac{90,67+98,04}{2} = \frac{188,71}{2} = 94,35$$

Capaian indikator kinerja 2 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2024 maupun dengan capaian triwulan II tahun 2023. Realisasi anggaran operasi kapal pengawas sampai triwulan II sebesar Rp755,359,762 atau sekitar 2,05%. Realisasi hari operasi kapal pengawas Hiu macan 06 sebesar 19 hari dengan 43 KII hasil riksa, sedangkan kapal pengawas Hiu 14 dengan 17 hari operasi dan 66 KII hasil riksa.

Analisa penyebab keberhasilan, capaian indikator kinerja Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dipengaruhi beberapa faktor antara lain;

- Adanya kebijakan pimpinan yang strategis.** Kepastian terkait anggaran PNBPN yang dialokasikan untuk BBM kapal pengawas yang belum dapat digunakan menyebabkan pimpinan mengambil kebijakan berupa peminjaman BBM dari KP yang lain antar Satker PSDKP maupun intern Pangkalan PSDKP Tual, sehingga dapat mengoptimalkan operasi kapal pengawas yang dapat memenuhi kinerja kapal pengawas walaupun anggaran belum tersedia.

2. **Pemeriksaan melebihi target yang ditetapkan.** Pencapaian terhadap indeks kinerja operasi kapal pengawas salah satunya berasal dari target pemeriksaan objek kelautan dan perikanan. Kapal pengawas diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 kapal perikanan per hari operasi dan 1 objek kelautan per periode operasi. Pemeriksaan yang melewati target menjadi salah satu aktualisasi sehingga dalam suatu periode operasi jika KP tidak mampu memenuhi target operasi dikarenakan cuaca dan faktor lainnya maka kelebihan dari target dapat menjadi semacam tabungan yang mengamankan perhitungan indeks kinerja pada komponen pemeriksaan kapal perikanan.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan, diantara kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja adalah **Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas,** walaupun kegiatan tersebut merupakan indikator kinerja yang berbeda tetapi merupakan aspek yang berjalan beriringan mendorong keberhasilan indeks operasi kapal. Pelaksanaan dan penjadwalan terkait perawatan rutin, darurat, serta docking maupun pembelian suku cadang direncanakan sematang dan sesuai kebutuhan kapal pengawasan sehingga operasi dapat berjalan optimal.

a. IKU 3: Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual merupakan indeks kinerja yang dipakai untuk mengukur optimalitas dari armada *speedboat* yang berada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual dapat didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;

- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

- Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau objek kelautan per hari.
- Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
- Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%

- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Dalam kurun waktu sampai akhir Triwulan II tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan operasi *speedboat* pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Capaian yang diperoleh sebesar **98,29** dengan persentase sebesar **108,01%** dari **target sebesar 91 pada Triwulan II 2024**. Capaian indeks kinerja dimaksud kami sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 9 Capaian IKU 3

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I	TW II	s/d	TW II
			2024	2024	TW II	2023
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	91	91	97,21	98,29	98,29	91,41

Selama Triwulan II tahun 2024 capaian indeks kinerja operasi speedboat melebihi target yang ditentukan yaitu 91. Perhitungan terhadap capaian indeks kinerja speedboat disajikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 10 Perhitungan capaian IKU 3

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	
Pangkalan PSDKP Tual	Albacore 02	15	30	100,0	2	0	0,0	40,00	0,00016	0,00016	42,1	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	102,05
	Marlin 14	10	18	90,0	2	1	25,0	46,00	0,00010	0,00012	44,9	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	110,88
	Napoleon 18	5	10	100,0	2	0	0,0	40,00	0,00005	0,00004	32,0	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	92,00
	Napoleon 25	15	34	113,3	2	0	0,0	45,33	0,00016	0,00012	32,0	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	97,33
	Napoleon 42	7	16	114,3	2	0	0,0	45,71	0,00007	0,00007	37,7	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	103,43
	Napoleon 49	5	7	70,0	2	0	0,0	28,00	0,00005	0,00005	41,8	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	89,76
	Napoleon 50	4	5	62,5	2	0	0,0	25,00	0,00004	0,00003	32,0	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	77,00
	RIB/Sea Rider 010	23	42	91,3	2	0	0,0	36,52	0,00024	0,00026	43,3	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	99,83
	Rubber Boat	15	37	123,3	2	0	0,0	49,33	0,00016	0,00012	32,0	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	101,33
	Jetski 01	12	10	41,7	2	4	100,0	56,67	0,00008	0,00007	32,2	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	108,89
	Jetski 02	12	11	45,8	2	4	100,0	58,33	0,00008	0,00007	32,2	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	110,56

Berdasarkan rumus yang telah dijabarkan sebelumnya maka hasil perhitungan yang dijabarkan pada tabel di atas masih harus dilakukan perhitungan rata-rata sebagai berikut;

$$\text{Capaian IKU 3} = \frac{97,21+99,37}{2} = \frac{196,58}{2} = 98,29$$

Analisa penyebab keberhasilan capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengawasan yang matang dan tepat sasaran, rencana pengawasan dengan speedboat dilaksanakan dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu sebagai informasi awal dalam penetapan RO;
2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi, hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan target operasi ataupun potensi wilayah pengawasan baik pengawasan perikanan maupun kelautan berdasarkan data pengawasan yang terlebih dahulu telah dilaksanakan sesuai pola dan kebiasaan pada kurun waktu tertentu, sehingga wilayah operasi dapat disesuaikan dengan wilayah potensi pelanggaran berdasarkan waktu ideal terjadinya;
3. Memenuhi kebutuhan logistik awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan selama melaksanakan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan berupa makanan, minuman, air bersih, maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks kinerja operasi speedboat antara lain:

1. Melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada. Secara teori, keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi armada speed sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang serta peralatan keselamatan, kondisi ini akan menentukan sejauh mana perawatan dan pemeliharaan akan dilakukan;
2. Mengidentifikasi armada yang sudah tidak dapat beroperasi, armada yang sudah tidak layak guna segera dilaksanakan pelaporan sehingga tidak lagi memperoleh anggaran operasi yang nantinya bisa menghambat pencapaian kinerja;

Realisasi anggaran yang dicapai dalam mendukung capaian Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual adalah sebesar Rp571,450,088,- atau sebesar 24,44% dari total pagu yang dianggarkan. Capaian hari seluruh armada *speedboat* yang tersebar di seluruh satwas dan wilker Pangkalan PSDKP Tual selama Triwulan II telah melaksanakan 118 hari operasi dari total keseluruhan 11 armada speedboat pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan kepada 211 KII dan 9 objek pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga total pemeriksaan sebanyak 220 unit.

11 Armada Pangkalan PSDKP Tual berada dalam kondisi performa yang siap operasi. Dalam kurun waktu Triwulan II tahun 2024 armada jetski Pangkalan PSDKP Tual berhasil mengamankan 1 Pelaku *destructive fishing* di perairan laut kota tual dengan sejumlah barang bukti. Realisasi hari operasi armada speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Tual akan kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11 Realisasi armada speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Tual

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	OPS	KAPAL DIPERIKSA				DITANGKAP			KONDISI KAPAL
			KII	KIA	PWP3K	JML	KII	KIA	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ALBACORE 002	15	30	-	-	30	-	-	-	SIAP OPERASI
2	RIB 010	18	34	-	-	34	-	-	-	SIAP OPERASI
3	SP NAPOLEON 050	4	5	-	-	5	-	-	-	SIAP OPERASI
4	SP. NAPOLEON 049	5	7	-	-	7	-	-	-	SIAP OPERASI
5	SP. NAPOLEON 018	5	10	-	-	10	-	-	-	SIAP OPERASI
6	SP. NAPOLEON 042	7	16	-	-	16	-	-	-	SIAP OPERASI
7	RUBBER BOAT	15	37	-	-	37	-	-	-	SIAP OPERASI
8	SP. NAPOLEON 025	15	34	-	-	34	-	-	-	SIAP OPERASI
9	SP. MARLIN 014	10	17	-	1	18	-	-	-	SIAP OPERASI
10	Jetsky 01	12	10	-	4	14	-	-	-	SIAP OPERASI
11	Jetsky 02	12	11	-	4	15	1	-	-	SIAP OPERASI
Jumlah		118	211	-	9	220	1	-	-	

c. IKU 4: Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

Indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas merupakan IKU yang berbicara tentang aspek pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas meliputi logistik kapal dan logistik personal. Logistik kapal antara lain, BBM, Pelumas, dan Alat Pelayanan, sedangkan logistik personal meliputi, bahan makanan AKP, air bersih, senjata api.

Kegiatan pemenuhan logistik dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual dan dikatakan tercapai dengan beberapa kriteria yaitu tersedianya berita acara sisa BBM akhir bulan, dokumen pembelian pelumas atau berita acara sisa pelumas, dokumen pemenuhan bahan makanan, dokumen pemenuhan air bersih, dokumen pemenuhan ATK dan bahan komputer, serta dokumen laporan senjata api dan amunisi.

FORMULA:

$$X_p = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

Keterangan:

- X_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
- X_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
- X_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
- X_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
- X_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
- X_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

Pada Triwulan II tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh **capaian sebesar 100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK 2024. Capaian ini diperoleh dengan ketentuan bahwa Pangkalan PSDKP Tual telah memenuhi setiap komponen logistik kapal maupun logistik personal. Pada tahun anggaran 2024 anggaran logistik kapal pengawas terutama pada BBM dan pelumas masih terdapat blokir PNPB, sehingga pada Triwulan II belum dapat dilakukan pembelian atas BBM maupun pelumas.

Pemenuhan atas kebutuhan BBM dan pelumas didasarkan pada stok yang tersisa di atas kapal dan merupakan kebijakan peminjaman atas BBM serta pengambilan BBM pada

pertamina walaupun pembayaran masih menunggu PNBP diturunkan. Berdasarkan manual indikator kinerja maka indeks kinerja ini dianggap terpenuhi dengan berita acara tersebut. Untuk komponen logistik lainnya yang tidak bersumber dari PNBP seperti pemenuhan natura, atk/cs, air bersih maka Pangkalan PSDKP telah melaksanakan pemenuhan yang dibuktikan dengan dokumen permintaan maupun SPJ pembelian, dan untuk ketersediaan senjata dan amunisi didasarkan pada laporan ketersediaan senpi maupun amunisi oleh kapal pengawas. Indikator kinerja utama ini merupakan indikator baru sehingga belum dapat dibandingkan. Berikut tabel capaian indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas.

Capaian IKU 4

$$X_p = (30\% \times 100) + (20\% \times 100) + (25\% \times 100) + (15\% \times 100) + (5\% \times 100) + (5\% \times 100)$$

$$X_p = 30 + 20 + 25 + 15 + 5 + 5$$

$$X_p = 100$$

Tabel 12 Capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I	TW II	s/d	TW I
			2024	2024	TW I	2023
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100	-

Analisis penyebab keberhasilan atas IKU persentase pemenuhan logistik kapal pengawas antara lain dikarenakan;

- Melaksanakan monitoring atas kebutuhan kapal pengawas, monitoring dapat dilaksanakan melalui pengajuan kebutuhan logistik yang berasal dari awak kapal pengawas;
- Memastikan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas maupun logistic personil, telah memiliki dokumen yang sesuai. Pangkalan PSDKP Tual melalui mekanisme maupun petugas yang diberikan wewenang harus memastikan pemenuhan logistik atas kebutuhan kapal dan awak kapal terdokumentasikan dengan baik berupa pelaporan maupun pertanggungjawaban;
- Memastikan kebutuhan logistik kapal pengawas dapat terpenuhi minimal dalam setiap triwulan, Pangkalan PSDKP Tual melalui tim kerja Prasarana dan sarana operasi kapal pengawas wajib memastikan kebutuhan logistik kapal terpenuhi

dengan monitoring dan tindak lanjut atas permohonan kebutuhan logistik yang diajukan kapal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian IKU antara lain:

- Pemetaan kebutuhan kapal terkait pembiayaan, hal ini maksudkan agar Pangkalan PSDKP Tual dapat melakukan plot terhadap kebutuhan logistik kapal yang pembiayaannya dapat ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme GUP, TUP ataukah LS, sehingga skala prioritas tetap dapat berjalan pemenuhan dapat terlaksana;
- Monitoring dan evaluasi kebutuhan kapal pengawas akan ketepatan dokumen yang dihasilkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas selama Triwulan II tahun anggaran 2024 telah menghasilkan realisasi sebesar Rp755,359,762,- atau sebesar 2,05% dari total anggaran yang dianggarkan.

3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan menurunkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah pernah dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual sebelumnya.

a. IKU 5: Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)

IKU Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;
6. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 13 Tahapan pemeriksaan IKU 5

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau 4. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Tahun 2024 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14 Capaian IKU 5

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II 2024	2024	TW I 2024	TW II 2024	s/d TW II 2023	TW II 2023
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	100	100	100	100	100	100

Tabel 15 Rekap pemeriksaan SDK Triwulan II

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah Unit/Pelaku Usaha Yang Terperiksa PANGKALAN PSDKP TUAL SDK TRIWULAN II TAHUN 2024												Jumlah Pelaku Usaha		
		KKPN		JIL		PWP3K		PRL		PENCEMARAN		DF		Taat	Tidak Taat	Total
		Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat			
1	Pangkalan PSDKP Tual			1		1	2	2	3	2	1	4	1	10	7	17
2	Wilker PSDKP Dobo			1	1					1	1			2	2	
3	Satwas PSDKP Sorong							5	1	1				6	1	7
4	Wilker PSDKP Raja Ampat	10	35				3	2	3	5				17	41	58
5	Satwas PSDKP Merauke			6						6				12	0	12
6	Satwas PSDKP Kaimana			7				2		7		6		22	0	22
7	Wilker PSDKP Fak-Fak			5						4	2	5		14	2	16
8	Satwas PSDKP Mimika			6					1	6		10		22	1	23

$$\text{Capaian IKU 5} = \frac{4.500+2.900+1.100+2.500+4.200+3.200}{184} = \frac{18.400}{184} = 100$$

$$\text{Capaian IKU 5} = \frac{tw I+tw II}{2} = \frac{100+100}{2} = \frac{200}{2} = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misanya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidental yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Tual (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;

4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidentil dengan menggunakan longboat atau dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun dengan langkah sanksi administratif. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2024 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp452,082,122,- atau 34,33% dari pagu sebesar Rp1,317,000,000,-.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 42 Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Pada tahun 2024 target pencemaran yang harus dicapai sebanyak 40 lembaga.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan. Perlu untuk diketahui bahwa pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual belum banyak terdapat pabrik atau industri skala besar yang berpotensi melakukan pencemaran.

Tabel 16 Rekap Pengawasan Pencemaran

NO	TGL PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN (ALAMAT DESA/KEC/KAB/KOTA/) KOORDINAT	NAMA PELAKU USAHA (PERUSAHAAN/ PERORANGAN)	DOKUMEN-DOKUMEN PERIZINAN	PENERBIT IZIN, MASA BERLAKU	IPAL	URAIAN HASIL PENGAWASAN	KETAATAN		REKOMENDASI
								TAAT	TDK TAAT	
A. PANGKALAN PSDKP TUAL										
1	27 Februari 2024	PT Samudera Indo Sejahtera (SIS) Jl. Dullah Raya KM.8, Desa Ngadi Kecamatan pulau Dullah Utara Kota Tual Propinsi Maluku Koordinat: S.05° 34.463' - E. 132° 43.135	Dipa M. Tamtelahitu (PT Samudera Indo Sejahtera)	Nomor Induk Berusaha : 8120103840915 PKKPR	PENERBIT OSS	Tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT Samudera Indo Sejahtera diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PKKPR, dan Ijin Lingkungan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT Samudera Indo Sejahtera diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran	Taat		Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya tersebut di atas tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang ditimbulkan akibat aktifitas pengolahan hasil perikanan PT Samudera Indo Sejahtera. Tidak ada rekomendasi tindak lanjut yang diberikan. Tindakan lain yang diusulkan adalah : 1. Agar menjadi perhatian pihak perusahaan PT Samudera Indo Sejahtera untuk menyediakan tempat penampungan atau filterisasi air limbah yang berasal dari tempat pencucian tangan sehingga limbah tersebut tidak langsung dialirkan kelaut dan mencemari laut; 2. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut.

2.	14 Maret 2024	PT Agung Gatra Permai beralamat di Lingkungan Yosep Ohoibun Timur, Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ,Propinsi Maluku Dengan koordinat : Lat. -5.659362' . Long 132.742947	Iwan Lieubun (PT Agung Gatra Permai)	Nomor Induk Berusaha : 220102730677	Penerbit OSS	Tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT Agung Gatra Permai diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PKKPR/KKRL dan Ijin Lingkungan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT Agung Gatra Permai diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran	-	TDK TAAT	1. Agar menjadi perhatian pihak PT Agung Gatra Permai untuk membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar limbah hasil proses pengolahan tidak langsung dialirkan ke laut dan mencemari laut; 2. PT Agung Gatra Permai agar memperhatikan dan mengelolah sarana pengolahan limbah cair secara tepat 3. Membuat laporan secara berkala tentang hasil pembuangan limbah setiap 6 bulan sekali 4. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut.
3.	11 Juli 2024	PT Abassy Samudra Mandiri beralamat di Desa Faan Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku Dengan koordinat : Lat. -5.682772' . Long 132.739'	Esti Utami (PT Abassy Samudra Mandiri)	Nomor Induk Berusaha : 0242011011694	DPM PTSP Maluku Tenggara	Tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT Agung Gatra Permai diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PKKPR/KKRL dan Ijin Lingkungan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT Abassy Samudra Mandiri diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ditemukan adanya pencemaran yang berasal dari aktifitas pengolahan.	TAAT	-	Tindakan lain yang diusulkan adalah : 1. Agar menjadi perhatian pihak Abassy Samudra Mandiri untuk segera mengurus SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan); 2. Membuat laporan secara berkala tentang hasil pembuangan limbah setiap 6 bulan sekali 3. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut.
B. SATWAS SDKP KAIMANA										

1.	17-Jan-24	KM. Yokoputra 09 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, kab. Kaimana, provinsi Papua Barat (3050'54' S - 133055'36'' E)	KM. Yokoputra 09 (Kapal Penangkap)	Nomor Induk Berusaha:9120010110054	penerbit sistim OSS	tidak ada IPAL karna pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. Yokoputra 09 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan (sesuai) dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (Perizinan lainnya) yaitu: - Nomor Induk Berusaha, dan Perizinan Usaha Subsektor penangkapan ikan	Taat		Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
2.	19-Feb-24	KM. MinaSamudra 03 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, kab. Kaimana, provinsi Papua Barat (3050'54' S - 133055'36'' E)	KM. MinaSamudra 03 (Kapal Pengangkut)	Nomor Induk Berusaha:9120010110054	penerbit sistim OSS	tidak ada IPAL karna pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. MinaSamudra 03 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan (sesuai)* dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (Perizinan lainnya)* yaitu: - Perizinan Berusaha Subsektor pengangkutan ikan pelabuhan pangkalan.	Taat		Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
3.	07-Mar-24	KM. SCANIA 1 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, kab. Kaimana, provinsi Papua Barat (3050'54' S - 133055'36'' E)	KM. SCANIA 1 (Kapal Pengangkut)	Nomor Induk Berusaha : 0232010242022	penerbit sistim OSS	tidak ada IPAL karna pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. SCANIA 1 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan dalam hal dokumen (sesuai)* dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (Perizinan lainnya)* yaitu: - Perizinan Berusaha Subsektor	Taat		Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

							pengangkutan ikan antara pelabuhan pangkalan			
4.	16-Apr-24	KM. Mina Samudera 01 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	Sarrun (KM. Mina Samudera 01 (Kapal Pengangkut))	Nomor Induk Berusaha : 9120010110054	penerbit sistim OSS	tidak ada IPAL karna pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakannya di KM. Mina Samudera 01 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perizinan lainnya, yaitu: - Nomor Induk Berusaha, dan Perizinan Usaha Subsektor Pengangkutan Ikan Memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya pencemaran di laut berupa : Penyediaan tempat penampungan oli bekas dari hasil penggantian kembali oli mesin induk dan tempat penampungan sampah plastik, berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran, yaitu tidak ditemukan aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya indikasi pencemaran perairan.	Taat	-	Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

5.	13-Mei-24	KM. ANTERO BINTANG yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, kab. Kaimana, provinsi Papua Barat Dengan koordinat : 3050'54' S - 133055'36" E	Ali Baba (KM. Antero Bintang) (Kapal Pengangkut)	Nomor Induk Berusaha : 507220004243	penerbit sistim OSS	tidak ada IPAL karna pengawasan dilakukan di kapal perikanan	<p>Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. Antero Bintang yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan dalam hal dokumen sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam perizinan lainnya yaitu: Perizinan Berusaha Subsektor pengangkutan ikan antara pelabuhan pangkalan</p> <p>Namun memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya pencemaran di laut berupa : Penyediaan tempat penampungan oli bekas dari hasil penggantian kembali oli mesin induk dan tempat penampungan sampah plastik, berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran yaitu: Tidak ditemukan aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya indikasi pencemaran perairan.</p>	Taat	-	Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
----	-----------	--	--	-------------------------------------	---------------------	--	--	------	---	--

6.	13-Jun-24	KM. SCANIA I yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, kab. Kaimana, provinsi Papua Barat Koordinat : 3050'54' S - 133055'36'' E	Sulaiman (KM. Scania I) (Kapal Pengangkut)	Nomor Induk Berusaha : 0232010242022	-	tidak ada IPAL karna pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. SCANIA 1 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan dalam hal dokumen (tidak sesuai)* dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (Perizinan lainnya)* yaitu: Perizinan Berusaha Subsektor pengangkutan ikan antara pelabuhan pangkalan Namun memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya pencemaran di laut berupa : Penyediaan tempat penampungan oli bekas dari hasil penggantian kembali oli mesin induk dan tempat penampungan sampah plastik, berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan (tidak ada)* pencemaran yaitu: Tidak ditemukan aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya indikasi pencemaran perairan.	Taat	-	Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
7.	09-Jul-24	KM. ANTERO BINTANG yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, kab. Kaimana, provinsi Papua Barat Koordinat : 30 50' 54' S - 1330 55' 36'' E	Ali Baba (KM. Antero Bintang) (Kapal Pengangkut)	Nomor Induk Berusaha : 507220004243	-	tidak ada IPAL karna pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan (tidak ada)* pencemaran yaitu: - Tidak ditemukan aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya indikasi pencemaran perairan.	Taat	-	Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

C SATWAS SDKP MTB										
1.	19-Jan-24	Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku (7057'21.15852" S - 131018' 27.0675" E)	La Lini (Usaha Pengolahan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 3108220051219		tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Usaha Pengolahan Ikan milik Hariyanto, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan (sesuai)* dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (Perizinan lainnya)* yaitu: Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan.	-	Tidak taat	Telah dilakukan pengawasan pencemaran di lokasi usaha UPI milik Hariyanto dan diperoleh hasil bahwa tidak ditemukan bukti terjadinya pencemaran dari kegiatan pengolahan ikan di lokasi pengawasan pencemaran
2.	21-Feb-24	Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku (7058' 39.40811" S - 131017' 54.94659" E)	Arsady (Usaha Penangkapan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 9120006241691		tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Usaha Penangkapan Ikan milik Arsady, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan (sesuai)* dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (Perizinan lainnya)* yaitu : Nomor Induk Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan, SLO dan SPB.		Tidak taat	Telah dilakukan pengawasan pencemaran di lokasi Usaha Penangkapan Ikan milik Arsady dan diperoleh hasil bahwa tidak ditemukan bukti terjadinya pencemaran dari kegiatan penangkapan ikan di lokasi pengawasan pencemaran
3.	26-Mar-24	Ritabel, Tanimbar Utara Kep. Tanimbar (alamat secara administratif) Koordinat: Lin. -709' 18. 49912"S, 131042'43.04363"E	Agustinus Romena (KM. Rajawali Perkasa 142) (Usaha Pengangkutan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 9120200161673		tidak ada pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Kapal Pengangkut Ikan dengan Nakhoda Agustinus Romena, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum yaitu: Nomor Induk Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Taat		Telah dilakukan pengawasan pencemaran di KM Rajawali Perkasa 142 dan diperoleh hasil bahwa tidak ditemukan bukti terjadinya pencemaran dari kegiatan penangkapan ikan di lokasi pengawasan pencemaran

							Subsektor Penangkutan Ikan, SLO dan SPB. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Kapal Pengangkut Ikan Rajawali Perkasa 142, diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran			
4.	30-Apr-24	Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku, Koordinat : Lin. -7° 9' 18.49912"S, 131° 42' 43.04363"E	Wilton Junedi Letihulur (PT Rajawali Laut Timur) (Usaha Penampungan Ikan/Karamba Jaring Apung)	Nomor Induk berusaha : 9120200161673	BKPM	Tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT Rajawali Laut Timur diperoleh bahwa usaha/kegiatan sudah sesuai dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam NIB dan PKKPR. Diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pencemaran pada Lokasi usaha.	Taat		Telah dilakukan pengawasan pencemaran di PT Rajawali Laut Timur dan diperoleh hasil bahwa tidak ditemukan bukti terjadinya pencemaran dari kegiatan penangkapan ikan di lokasi pengawasan pencemaran
5.	06-Mei-24	Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku, pada Kapal Pengangkut Ikan KM. Hasil Permata Bahari Koordinat : Lin. - 7.98412, 131.29053	Abdul Wahid Ali Rahman (KM. Hasil Permata Bahari) (Usaha Pengangkut Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 9120000580871	-	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Kapal Pengangkut Ikan KM. Hasil Permata Bahari, diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran.	Taat		Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya tepatnya di kapal pengangkut ikan dengan nama KM Hasil Permata Bahari tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam hal pencemaran perairan sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya pengawasan rutin minimal setahun sekali terhadap KM. Hasil Permata Bahari.

6.	05-Jun-24	Usaha Pembudidayaan Ikan(Keramba Jaring Apung) milik PT. Rajawali Laut Timur yang terletak diDesa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan TanimbarKoordinat: Lin. 0080 08'04"S, 1300 56'32"E	Markus Menase Umakpauny (PT. Rajawali Laut Timur(Usaha Pembudidayaan Ikan)(Keramba Jaring Apung)	Nomor Induk Berusaha : 9120000580871	-	tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di lokasi budidaya ikan milik PT Rajawali Laut Timur yang ada desa Namtabung dengan kepala Karamba Markus Menase Umakpauny, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan (sesuai) dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (Perizinan lainnya) yaitu: Nomor Induk Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko SubsektorPembudidayaan ikan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di lokasi budidaya ikan milik PT Rajawali Laut Timur yang ada desa Namtabung, diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan (tidak ada) pencemaran.	-	Tidak taat	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya tepatnya di budidaya ikan milik PT Rajawali Laut Timuryang ada desa Namtabung tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam hal pencemaran perairan sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya pengawasan rutin minimal setahun sekali terhadap usaha budidaya ikan milik PT Rajawali Laut Timur yang ada desa Namtabung.
D. SATWAS SORONG										
1.	14-Mar-24	PT. CITRA RAJA AMPAT CANNING (CRAC) di Jl. Ahmad Yani No. 2 Kel. Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (00° 52'48.5" S 131°15'23.6" E)	PT. CITRA RAJA AMPAT CANNING (CRAC)	Nomor Induk Berusaha : 9120300250548	Penerbit : OSS	tidak ada IPAL	Hasil Pengawasan diperoleh fakta bahwa secara keseluruhan dokumen yang menjadi persyaratan dalam rangka pencegahan dan pengelolaan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya sudah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya badan air yang tercemar dan/atau adanya zat-zat pencemar di wilayah usaha PT. Citra Raja Ampat Canning (CRAC).	Taat		Pelaku usaha hendaknya tetap melakukan komunikasi dan pelaporan secara berkala tiap tahun melalui OSS jika terjadi perubahan dalam KBLI nya.. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seyogyanya tetap menjaga sanitasi dan higienis tempat usahanya karena hasil prosesing yang berasal dari produk-produk perikanan PT. Citra Raja Ampat Canning (CRAC) menjadi salah satu komoditi unggulan untuk ekspor.
E. SATWAS SDKP MERAUKE.										

1.	22-Jan-24	Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik H.Saenal pada KMN. MEKAR SARI JAYA-I (8° 27'30" S - 140° 25'00" E)	Saenal (Usaha Penangkapan Ikan) (KMN. MEKAR SARI JAYA - I)	Nomor Induk Berusaha : 0709210029584	Penerbit : OSS	tidak ada IPAL karna pengawasan dilakukan di kapal perikanan	1. Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik H. Saenal bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut karena penanganan limbah dari KMN. MEKAR SARI JAYA -I. 2. Berdasarkan hasil pengawasan sumber pencemaran adalah berupa limbah rumah tangga dari masyarakat yang tinggal di sekitar area Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik H. Saenal.	Taat		1. Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat ada atau tidaknya dampak dan pengaruh dari aktifitas kegiatan perikanan dan non perikanan di sekitar Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke. Terhadap pencemaran perairan. 2. Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.
2.	22-Feb-24	PT. Perikanan Indonesia, Unit Merauke dengan Alamat Jl.Noari Komplek Pelabuhan Perikanan, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan (8° 47'.93" S - 140° 37'.97" E)	PT. Perikanan Indonesia (Perindo) Unit Merauke (Unit Pengolahan Ikan (pembekuan ikan))	Nomor Induk Berusaha : 8120110232884	Penerbit : OSS	Ada IPAL	1. Kegiatan pengawasan dilaksanakan di usaha pengolahan ikan PT. Perikanan Indonesia, Unit Merauke terletak di Jl. Noari, Komplek Pelabuhan Perikanan Nusatara, Kel. Karang indah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; 2. PT. Perikanan Indonesia Unit Merauke telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Merauke, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); 3. IPAL yang terpasang Sudah ada tetapi belum memiliki Surat Izin Lingkungan dari Dinas terkait.	Taat		1. Perbaiki IPAL yang sudah Terpasang Sesuai dengan Standar Dari Dinas Lingkungan Hidup; 2. Perlu adanya monitoring dan pengawasan rutin yang dilakukan agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang perikanan.
3.	14-Mar-24	Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke milik PT. Aru Jaya / Benny Tandra pada KMN. RAMA 101, dengan kordinat 8° 28'.11" S - 140° 23'.43" E	Benny Tandra (KMN. RAMA 101)(Usaha Pengangkut Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 1509210001508	Penerbit : OSS	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di kapal perikanan	1. Berdasarkan hasil pengawasan sumber pencemaran adalah berupa limbah cairkegiatan perikanan (Pelabuhan perikanan) dan non perikanan (tempat tambat labuh kapal, dan limbah rumah tangga serta tempat perbaikan mesin kapal); 2. Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Tangkahan	Taat		1. Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat dampak dan pengaruh dari aktifitas pencemaran di Kompleks Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang milik Benny Tandra; 2. Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.

								Gudang Arang milik Benny Tandrabagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut secara signifikan karena penanganan limbah bahan bakar dari KMN. RAMA 101 sudah dilakukan dengan baik, hanya limbah rumah tangga saja yang belum ditangani dengan baik.			
4.	17-Apr-24	Pelabuhan Tangkahan Kelapa Lima Kab. Merauke pada KMN. AL VARENDRA 01, dengan kordinat 8° 28'30.432" S - 140° 25'7.08" E	ARIFAI SUPU (KMN. AL VARENDRA 01) (Usaha Penangkapan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 1224000350396	Penerbit : OSS	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan di KMN. AL VARENDRA 01 tidak ditemukannya sumber pencemaran perairan yang diakibatkan dari kegiatan perikanan dalam hal ini KMN. AL VARENDRA 01, namun hanya ditemukan sampah-sampah plastik dari rumah penduduk di sekitar pelabuhan tangkahan Kelapa Lima dan juga dari kapal-kapal lainnya yang sedang melakukan perbaikan kapal.	Taat		1. Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat dampak dan pengaruh dari aktifitas pencemaran di Kompleks Pelabuhan Tangkahan Kelapa Lima; 2. Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.	
5.	15-Mei-24	Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke milik PT. Aru Jaya / Benny Tandra pada KMN. TEMAN SETIA 03, dengan kordinat 8° 28'.11" S - 140° 23'.43" E	Handri Gaitedi (KMN. TEMAN SETIA 03) (Usaha Penangkapan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 2603220002438	Penerbit : OSS	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di kapal perikanan	Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang milik Benny Tandrabagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut secara signifikan karena penanganan limbah bahan bakar dari KMN. TEMAN SETIA 03 sudah dilakukan dengan baik, hanya limbah rumah tangga saja yang belum ditangani dengan baik.	Taat		1. Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat dampak dan pengaruh dari aktifitas pencemaran di Kompleks Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang milik Benny Tandra; 2. Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.	
6.	12-Jun-24	Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik H. Saenal pada KMN. LEONORA 02, dengan kordinat 8° 27'30" S - 140° 25'00" E	Frengky Fransisko Tan (KMN. Leonora 02)	Nomor Induk Berusaha : 1412210053556	Penerbit : OSS	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di kapal perikanan	1. Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik Frengky Fransisko Tan bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut karena penanganan limbah	Taat		1. Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat ada atau tidaknya dampak dan pengaruh dari aktifitas kegiatan perikanan dan non perikanan di sekitar Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik Frengky Fransisko Tan terhadap pencemaran perairan; 2. Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang	

							dari KMN. LEONORA 02 sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Berita Acara Pengawasan pada tanggal 12 Juni 2024; 2. Berdasarkan hasil pengawasan sumber pencemaran adalah berupa limbah rumah tangga dari masyarakat yang tinggal di sekitar area Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik Frengky Fransisko Tan			sudah tersertifikasi.
F. SATWAS SDKP MIMIKA.										
1.	17-Jan-24	KM. Mitra Jaya 89 yang bertempat pada pelabuhan perikanan PPI. Poumako (136.771723° BT - - 4.797569°LS)	Hendri (KM. Mitra Jaya 89) (Kapal Penangkap)	Nomor Induk Berusaha : 8120106890591	-	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di Kapal Perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Poumako - Mimika kepada KM. Mitra Jaya 89, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan (sesuai)* dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (Perizinan lainnya)* yaitu: Memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya pencemaran di laut berupa : Penyediaan Kantong plasrik dan tong sampah untuk penyimpanan sampah dan, memiliki tepat untuk penampungan oli bekas hasil penggantian kembali oli mesin induk dan mesin pendingin freeser	Taat		Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah teradinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal

2.	20-Feb-24	KM. Karya Mina Utama yang bersandar pada lokasi Pelabuhan Perikanan Poumako, (kecamatan) Mimika Timur-Poumako. (136.771723°BT - - 4.797569°LS)	Sunarsih (KM. Karya Mina Utama) (Kapal Penangkap)	Nomor Induk Berusaha : 1232000132018	-	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di Kapal Perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Poumako - Mimika kepada KM. Karya Mina Utama, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan (sesuai)* dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (Perizinan lainnya)* yaitu: Memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya pencemaran di laut berupa : Penyediaan Kantong plasrik dan tong sampah untuk penyimpanan sampah dan, memiliki tepat untuk penampungan oli bekas hasil penggantian kembali oli mesin induk dan mesin pendingin freeser	Taat	Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah teradinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal
3.	14-Mar-24	Adapun lokasi pengawasan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dengan kordinat 4.797635° S – 136.772112° T	Estina Juniati Rumlawang (KMN. SEMOGA JAYA) (Usaha Penangkapan Ikan	Nomor Induk Berusaha : 29122100161460002	Penerbit : OSS	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di Kapal Perikanan	Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut karena penanganan limbah dari KMN. SEMOGA JAYA sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Berita Acara Pengawasan nomor B. /PSDKPLan.6-MIM/KP.440/XI/2024, tanggal 19 Maret 2024; 2. Berdasarkan hasil pengawasan sumber pencemaran adalah berupa limbah rumah tangga dari masyarakat yang tinggal di sekitar area Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua	Taat	Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat ada atau tidaknya dampak dan pengaruh dari aktifitas kegiatan perikanan dan non perikanan di sekitar Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua terhadap pencemaran perairan; Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.

4.	19-Apr-24	Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dengan kordinat 4.797635" S – 136.772112" T	Estina Juniati Rumlawang (KMN. SEMOGA JAYA) (Usaha Penangkapan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 29122100161460002	Penerbit : OSS	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di Kapal Perikanan	Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut karena penanganan limbah dari KMN. BERKAH LAUT sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Berita Acara Pengawasan nomor B.1132/PSDKPLan.6-MIM/KP.440/IV/2024, tanggal 19 April 2024; Berdasarkan hasil pengawasan sumber pencemaran adalah berupa limbah rumah tangga dari masyarakat yang tinggal di sekitar area Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.	Taat	Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat ada atau tidaknya dampak dan pengaruh dari aktifitas kegiatan perikanan dan non perikanan di sekitar Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua terhadap pencemaran perairan. Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.
5.	15-Mei-24	Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Pada KM. Telaga Sari 01 Koordinat : 4.797635" S – 136.772112" T	Hasian Siregar (KM. Telaga Sari 01) (Usaha Penangkapan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 02112100105170001	Penerbit : OSS	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di Kapal Perikanan	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Kapal Pengangkut Ikan KM. TELAGA SARI 01 diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran.	Taat	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya tepatnya di kapal pengangkut ikan dengan nama KM TELAGA SARI 01 tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam hal pencemaran perairan sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya pengawasan rutin minimal setahun sekali terhadap KM. TELAGA SARI 01
6.	18-Jun-24	Pelabuhan Perikanan Poumako Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Pada KM. Salsabila A1 Koordinat : 4.797988' S - 136.772197' T	Susanto Ang (KM. Salsabila A1) (Kapal Penangkap Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 9120010000399	Penerbit : OSS	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di Kapal Perikanan	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Kapal Pengkap Ikan KM. Salsabila A1 diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran.	Taat	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya tepatnya di kapal pengangkut ikan dengan nama KM TELAGA SARI 01 tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam hal pencemaran perairan sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya pengawasan rutin minimal setahun sekali terhadap KM. TELAGA SARI 01
G. WILKER RAJA AMPAT									

1.	16-Jan-24	PT. Seahorse Paradise, Kabupaten Raja Ampat. (0°46'230" S - 130.44'747" E)	Pricilia Momoa (PT. Seahorse Paradise) (Resort Papua Paradise)	Nomor Induk Berusaha : 9120300371036	Penerbit OSS	Tidak ada IPAL	1. Kondisi perairan di sekitar PT. Seahorse Paradise masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Seahorse Paradise sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada..	Taat		1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.
2.	13-Feb-24	PT. Cendana Indopearls terletak di Kampung Selpele Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat. (00°11'296" S - 130°15'434" E)	Nofi Elizabeth Ndolo (PT. Cendana Indopearls) (Budidaya Mutiara)	Nomor Induk Berusaha : 8120101932048	Penerbit OSS	Tidak ada IPAL	1. Kondisi perairan di sekitar PT. Cendana Indopearls masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Cendana Indopearls sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada..	Taat		1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.
3	21-Mar-24	Pulau Finkawut, Kapung Kalobu, Distrik Salawati Tengah, Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat.	Godlif Sulmury (Usaha Budidaya Mutiara/Pembesaran Moluska Laut)	Nomor Induk Berusaha : 2705220046749	Penerbit OSS	SPPL	Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Usaha pembudidayaan Godlif Sulmury belum melaksanakan upaya pengolahn limbah dengan baik. 2. Sarana dan prasarana pengolahan masih minim 3. Kondisi perairan di sekitar Godlif Selmury masih terjaga dengan baik.	Taat		Saran yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu : 1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.
4	18-Apr-24	CV. Putra Raja Bahari di Pulau Gam, Kampung Kabui, Distrik Meosmansar Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya Koordinat : 0°18'43.96"S 130°21'53.99"E.	Solichin (CV. Putra Raja Bahari)(Usaha Pembesaran Ikan Bersirip Laut)	Nomor Induk Berusaha : 13082300478150002	Penerbit OSS	Ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di CV. Putra Raja Bahari, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PKKPR, dan Ijin Lingkungan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di CV. Putra Raja Bahari diperoleh hasil bahwa	Taat		Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya tersebut di atas tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang ditimbulkan akibat aktifitas pengolahan hasil perikanan CV. Putra Raja Bahari dan tidak ada rekomendasi tindak lanjut yang diberikan. Tindakan lain yang diusulkan adalah: 1. Agar menjadi perhatian pihak perusahaan CV. Putra Raja Bahari untuk menyediakan tempat sampah disetiap ruangan dan lokasi kerja supaya limbah yang dihasilkan tidak bereserakan. 2. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut.

							pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran.			
5	17-Mei-24	PT. Kabui Mutiara Sejahtera di Pulau Gam, Kampung Kabui, Distrik Meosmansar Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat DayaKoordinat 0°26'15.58"S 130°29'0.90"E.	Supriyadi (PT Kabui Mutiara Sejahtera)(Pembudidayaan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 1306230124774	Penerbit OSS	SPPL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT. Kabui Mutiara Sejahtera, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PKKPR, dan Ijin Lingkungan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di PT. Kabui Mutiara Sejahtera diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran.	Taat		Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya tersebut di atas tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang ditimbulkan akibat aktifitas pengolahan hasil perikanan PT. Kabui MutiaraSejahtera dan tidak ada rekomendasi tindak lanjut yang diberikan. Tindakan lain yang diusulkan adalah:1. Agar menjadi perhatian pihak perusahaan PT. Kabui Mutiara Sejahtera untuk membuat bak penampungan sementara limbah berupa air laut yang telah digunakan dari dalam ruang pembenihan, agar kotaran maupun limbah padat yang terikut dapat terendap sebelum dibuang kelaut.2. Menyediakan tempat sampah di setiap ruangan dan lokasi kerja supaya limbah yang dihasilkan tidak bereserakan.3. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut.
H. WILKER FAK-FAK										
1.	19-Jan-24	KM. Cahaya Mulya 05 Jl. Yos Sudarso Pasar Torea Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten FakFak. (-2.929308616814837 - 132.2697952017188)	Sudirman (KM. Cahaya Mulya 05) (Kapal Penangkap Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 9120001272067	-	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di Kapal Perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa sumber pencemaran berasal dari limbah dari kegiatan kapal perikanan. Diarahkan agar menyiapkan wadah yang lebih baik sebagai tempat penampungan sementara. Menemukan adanya sampah plastic yang di buang namun belum pada tempatnya sehingga perlu diperhatikan sampah plastik agar dibuang sesuai pada tempatnya.	Taat		Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait dampak dan pengaruh dari aktivitas yang menyebabkan pencemaran yang terjadi. Diharapkan adanya pengujian sampel air dengan menggunakan metode yang benar dari laboratorium yang sudah tersertifikasi sehingga dapat menunjukkan data yang akurat dari kualitas air dilokasi pengawasan. Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan perlu dilakukan secara kontinyu untuk mendeteksi adanya pencemaran perairan yang berbahaya.

2.	13-Feb-24	Unit Pengolahan Ikan (UPI) milik Bapak PT. Mulia Perikanan Indonesia dengan alamat Jl. Yos Sudarso Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten FakFak. (- 2.9269232280977837 - 132.2701083496213)	Keseng (PT. Mulia Perikanan Indonesia (Unit Pengolahan Ikan))	Nomor Induk Berusaha : 9120210040477	penerbit oss	Tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa sumber pencemaran berasal dari limbah cair, sampah plastik, serpihan sterefoam serta limbah dari kegiatan pengolahan ikan. Tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah yang standar sehingga semua limbah dari kegiatan pengolahan ikan sehingga perairan disekitarnya tercemar. Dampak dari aktivitas perikanan dan non perikanan yang terjadi bagi lingkungan perairan berdasarkan pengamatan secara kasat mata, dapat dinyatakan belum menyebabkan penurunan kualitas air secara signifikan.	Tidak taat	Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait dampak dan pengaruh dari aktivitas yang menyebabkan pencemaran yang terjadi. Merekomendasikan untuk PT. Mulia Perikanan Indonesia membuat segera Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan cara dilakukan pemantauan secara berkala. Diharapkan adanya pengujian sampel air dengan menggunakan metode yang benar dari laboratorium yang sudah tersertifikasi sehingga dapat menunjukkan data yang akurat dari kualitas air dilokasi pengawasan. Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan perlu dilakukan secara kontinyu untuk mendeteksi adanya pencemaran perairan yang berbahaya.
3.	14 Maret 2024.	Unit Pengolahan Ikan (UPI) milik Bapak PT. Indoprima Utama Mina dengan alamat Jl. Yos Sudarso Komplek PPI Dulan Pokpok Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten FakFak. (- 2.9271294887489345 - 132.2669054567814)	Kaslim (PT. Indoprima Utama Mina (Unit Pengolahan Ikan))	Nomor Induk Berusaha : 9120001272067	-	Tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa sumber pencemaran berasal dari limbah cair, sampah plastik, Ikan hasil sortir serta limbah dari kegiatan pengolahan ikan. Tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah yang standar sehingga semua limbah dari kegiatan pengolahan ikan sehingga perairan disekitarnya tercemar. Pengawas Kelautan telah memberikan teguran kepada PT. Indoprima Utama Mina sejak tahun 2022 agar segera membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) namun sampai saat ini PT. Indoprima Utama Mina belum membuat IPAL sehingga perlu diberikan tindakan tegas berupa Surat Peringatan 1 (SP1) kepada PT. Indoprima Utama Mina.	Tidak taat	Teguran tegas dengan Surat Peingatan 1 (SP1) dan merekomendasikan PT. Indoprima Utama untuk membuat IPAL dengan cara pemantauan secara berkala

4.	18-Apr-24	KM. Glori 01 (Kapal Penangkap Ikan) Jl. Yos Sudarso Pasar Torea Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten FakFak. Dengan titik Koordinat : -2.930405545687252 - 132.30085752904415	Imelda Souisa (KM Glori 01) (Kapal Penangkap Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 2606230183526	penerbit oss	Tidak ada IPAL karena pengawasan dilakukan di Kapal Perikanan	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa sumber pencemaran berasal dari limbah dari kegiatan kapal perikanan. · Menyiapkan wadah yang lebih baik sebagai tempat penampungan sementara. · Menemukan adanya sampah plastik yang di buang namun belum pada tempatnya sehingga perlu diperhatikan sampah plastik agar dibuang sesuai pada tempatnya	Taat	· Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait dampak dan pengaruh dari aktivitas yang menyebabkan pencemaran yang terjadi. · Diharapkan adanya pengujian sampel air dengan menggunakan metode yang benar dari laboratorium yang sudah tersertifikasi sehingga dapat menunjukkan data yang akurat dari kualitas air dilokasi pengawasan. · Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan perlu dilakukan secara kontinyu untuk mendeteksi adanya pencemaran perairan yang berbahaya.
5.	10-Mei-24	PT. Marine Gratia Indonesia Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulan Pokpok, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Titik Koordinat : - 2.9279384587285113 - 132.2672229272127	PT. Marine Gratia Indonesia	Nomor Induk Berusaha : 1219000322726	-	Ada IPAL	Lokasi pengawasan terdapat beberapa kegiatan perikanan dan non perikanan yakni Unit Pengolahan Ikan, sementara yang non perikanan adalah pembuangan limbah dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan berupa Pembungan Limbah yang telah dikelola menggunakan IPAL, dimana hasil olahan ikan yang telah melalui proses pencucian dan pembersihan ikan dapat dikelola dengan baik melalui IPAL sehingga tidak menimbulkan pencemaran perairan disekitarnya.	Taat	· Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait dampak dan pengaruh dari aktivitas yang menyebabkan pencemaran yang terjadi. · Diharapkan adanya pengujian sampel air dengan menggunakan metode yang benar dari laboratorium yang sudah tersertifikasi sehingga dapat menunjukkan data yang akurat dari kualitas air dilokasi pengawasan. · Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan perlu dilakukan secara kontinyu untuk mendeteksi adanya pencemaran perairan yang berbahaya.
6.	13-Jun-24	KM. Riski Putra 03 Jl. Yos Sudarso Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Titik Koordinat : - 2.9294562803794904 - 132.27085266262293	Rajiman (PT. Marine Gratia Indonesia)(KM Riski Putra 03) (Unit Pengolahan Ikan)	NIB : 1280000431793	-	Tidak Ada IPAL Karena Pengawasan Dilakukan di Kapal Perikanan	· Berdasarkan hasil pengawasan bahwa sumber pencemaran berasal dari limbah dari kegiatan kapal perikanan (KM. Riski Putra 01) dapat dikelola dengan baik dengan menyiapkan tempat penampungan oli bekas dan tempat sampah. · Tidak Menemukan adanya limbah/sampah plastik hasil kegiatan dari kapal perikanan.	Taat	Dalam melaksanakan kegiatan kapal perikanan saat melakukan tambat labuh tidak membuang sampah dan sisa oli bekas dari mesin ke laut sehingga kecerahan perairan disekitar KM. Riski Putra 03 tetap terjaga dengan baik.

I. WILKER PSDKP DOBO

1.	30-Apr-24	CV. Bobby Arafura Fishing Industries JL. Raja Sam, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku pada titik Koordinat 5°45'29" S dan 134°14'8" E	Bobby Agustinus (CV. Bobby Arafura Fishing Industries)	Nomor Induk Berusaha : 8120313180026	Penerbit OSS	Ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di CV. Bobby Arafura Fishing Industries diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PKKPR, dan Ijin Lingkungan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di CV. Bobby Arafura Fishing Industries diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran	Taat	-	1. Agar menjadi perhatian pihak perusahaan CV. Bobby Arafura Fishing Industries untuk menyediakan tempat penampungan atau filterisasi air limbah yang berasal dari tempat pencucian tangan sehingga limbah tersebut tidak langsung dialirkan kelaut dan mencemari laut; 2. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut.
2	22-Mei-24	CV. Mitra Leo Group Jl. Gosamtian, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku pada titik Koordinat 5°45'50" S dan 134°13'9" E.	Albertus Glenardo Horas (CV. Mitra Leo Group)	Nomor Induk Berusaha : 8120013190586	penerbit oss	tidak ada IPAL	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di CV. Mitra Leo Group diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam PKKPR, dan Ijin Lingkungan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di CV. Mitra Leo Group diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran.	-	Tidak taat	1. Agar menjadi perhatian pihak perusahaan CV. Mitra Leo Group untuk menyediakan tempat penampungan atau filterisasi air limbah yang berasal dari tempat pencucian tangan sehingga limbah tersebut tidak langsung dialirkan kelaut dan mencemari laut; 2. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pencemaran laut.

a.2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan dilaksanakan di wilayah konservasi

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan dilaksanakan di wilayah konservasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikategorikan dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Kawasan konservasi yang dikelola di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual berjumlah 3 kawasan. Kawasan tersebut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam menunjang capaian ini adalah pengawasan pemanfaatan pelaku usaha pada kawasan konservasi serta kesesuaian lokasi usaha dengan zonasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri tersebut.

Kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh Pangkalan PSDKP Tual tercantum dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 17 Kawasan konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikelola lingkup Pangkalan PSDKP Tual

No.	Nama Kawasan	Lokasi	Dasar Hukum
1.	SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Sorong, Papua Barat	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
2.	SAP Raja Ampat	Raja Ampat, Papua Barat	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.64/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
3.	SAP Aru Bagian Tenggara	Kepulauan Aru, Maluku	Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.63/Men/2009 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara Dan Laut Di Sekitarnya Di Provinsi Maluku

Pada Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan pelaku usaha pada Kawasan konservasi perairan Nasional (KKPN). Pelaksanaan pengawasan Kawasan konservasi dilaksanakan pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional SAP Raja Ampat yang dilaksanakan oleh Wilker PSDKP Raja Ampat serta pengawasan Kawasan konservasi perairan

nasional SAP Aru Bagian Tenggara yang dilaksanakan oleh Wilker PSDKP Dobo, Kepulauan Aru. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kei Kecil dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan pengawasan Kawasan konservasi daerah.

Kegiatan pendukung utama pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi : Pengawasan ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Pada Tahun 2024 dari 7 target Pangkalan PSDKP Tual telah memeriksa 45 pelaku usaha termasuk di dalamnya terhadap pemanfaat yang berada beraktifitas dalam kawasan konservasi.

Tabel 18 Data Pengawasan KKPN

NAMA KKPN-KKPD	TANGGAL PENGAWASAN	ZONA YANG DIAWASI	PELAKU USAHA	JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN	DOKUMEN PERIZINAN	MASA BERLAKU	HASIL PENGAWASAN	PELANGGARAN	REKOMENDASI	
PANGKALAN PSDKP TUAL										
Wilker Raja Ampat										
SAP Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya	27 s/d 28 Januari 2024	Zona Pemanfaatan	1.	Kapal Bela Beto 05	Melintas didalam Kawasan setelah selesai melakukan pengangkutan ikan didalam KK Kepulauan Raja Ampat. dari hasil pemeriksaan dokumen kapal diketahui bahwa kapal ini berpangkalan di kota Sorong dan melakukan pengangkutan ikan diwilayah Raja Ampat dari nelayan local	-	-	Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local	tidak memiliki ijin masuk kawasan konservasi	Mengurus Ijin masuk kawasan
		Zona Pemanfaatan	2.	Kapal Sun Odyssey 49	Snorkling (Wisata Bahari)	-	-		Tidak memiliki karcis masuk kawasan	Segera melakukan pembayaran kepada pihak pengelolaan kawasan
	30 s/d 31 Januari 2024	Zona Pemanfaatan	3.	Kapal Aqua Blue	Snorkling dan Diving	00158/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT/ PAR.H/III/2024	Berlaku sekali kunjungan selama 2 hari	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi dan diizinkan melanjutkan kegiatan	1. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local. 2. Peningkatan kegiatan pengawasan pada waktu dimana terjadi banyak pemanfaatan.
		Zona Pemanfaatan	4.	Kapal Cabana	Snorkling, Tracking dan Diving	Tarif Layanan Pemeliharaan Lingkungan	-	Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan diberikan sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	3. Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik

		Zona Pemanfaatan	5.	Kapal Raja Ampat Dive Resort	Tracking dan Snorkling	Tarif Layanan Pemeliharaan Lingkungan	-	Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan diberikan sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional
		Zona Pemanfaatan	6.	Kapal Coral Adventure	Snorkling	00120/BKKN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT/PAR.H/I/2024	Berlaku sekali kunjungan selama 1 hari	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi
		Zona Pemanfaatan	7.	Kapal Kuda Nil Exprolers	Tracking dan Snorkling	00149/BKKN KUPANG-KK KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT/PAR.H/I/2024	Berlaku sekali kunjungan selama 1 hari	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi dan diizinkan melanjutkan kegiatan
		Zona Pemanfaatan	8.	Kapal Rascall	Tracking, Snorkling dan Diving	Tanda masuk kapal dari Dinas Pariwisata Raja Ampat	-	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi dan diizinkan melanjutkan kegiatan
		Zona Pemanfaatan	9.	Kapal Sipuliang 2	Video Comercial, Snorkling, Tracking	Tanda masuk kapal dari Dinas Pariwisata Raja Ampat	-	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional
		Zona Pemanfaatan	10.	Kapal Yongkorano Home Stay	Snorkling dan Tracking	Tarif Layanan Pemeliharaan Lingkungan	-	Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan diberikan sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional
		Zona Pemanfaatan	11.	Kapal Terima Kasih Home Stay	Snorkling dan Tracking	Tarif Layanan Pemeliharaan Lingkungan	-	Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan diberikan sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional

		Zona Pemanfaatan	12.	Kapal Sea Horse	Snorkling, Tracking, dan Diving	Tanda masuk kapal dari Dinas Pariwisata Raja Ampat	-	Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan diberikan sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
		Zona Pemanfaatan	13.	Kapal Tramp II	Snorkling dan Tracking	00001/BKKPN KUPANG- KK KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT /PAR.T/I/ 2024	Berlaku dari 20-01-2024 sampai 20-01-2025	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi dan diizinkan melanjutkan kegiatan	
		Zona Pemanfaatan	14.	Kapal Sun Odyssey 49	Snorkling dan Tracking	-	-	Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan diberikan sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
	21 s/d 22 Februari 2024.	Zona Pemanfaatan	15	KM (Bagan) Aswan Jaya	Penangkapan Ikan	NIB : 0412210012164	-	Tidak Melakukan Kegiatan Bagan	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	1. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local. 2. Peningkatan kegiatan pengawasan pada waktu dimana terjadi banyak pemanfaatan.
		Zona Pemanfaatan	16	Kapal Full Moon	Snorkling	00283/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN RAJA AMPAT/PAR.H/II/2024	Berlaku sekali kunjungan selama 1 hari	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	3. Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik.
	23 s/d 24 Februari 2024.	Zona Pemanfaatan	17	Kapal Sidatu Bua	Snorkling dan Diving	00291/ BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT/PAR.H/II/2024	Berlaku sekali kunjungan selama 1 hari	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi	1. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local. 2. Peningkatan kegiatan pengawasan pada waktu dimana

	Zona Pemanfaatan	18	Kapal Damai 02	Snorkling	00269/ BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT/PAR.H/II/2024	Berlaku sekali kunjungan Selama 1 hari	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi	terjadi banyak pemanfaatan. 3. Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik.
	Zona Pemanfaatan	19	Kapal Mantra	Snorkling dan Diving	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
	Zona Pemanfaatan	20	Kapal Fenides	Snorkling dan Diving	00265/ BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT/PAR.H/II/2024	Berlaku sekali kunjungan Selama 2 hari	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi	
	Zona Pemanfaatan	21	Kapal Canele	Tracking dan Snorkling	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
	Zona Pemanfaatan	22	Kapal Nebula	Tracking dan Snorkling	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
	Zona Pemanfaatan	23	Kapal Dream Bay	Tracking dan Snorkling	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
	Zona Pemanfaatan	24	Kapal Rafila 01	Tracking dan Snorkling	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
	Zona Pemanfaatan	25	KM. Putri Raisa 02	Penangkapan Ikan	TDKP no 45.21.9198.30.00005	-	Tidak Melakukan Kegiatan Bagan	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	

15 s/d 18 Maret 2024	Zona Pemanfaatan	26	KM. Putri Raisa 01	Penangkapan Ikan	TDKP no 45.21.9198.30.00004	-	Tidak Melakukan Kegiatan Bagan	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	1. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local. 2. Peningkatan kegiatan pengawasan pada waktu dimana terjadi banyak pemanfaatan. 3. Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik.
	Zona Pemanfaatan	27	KM. Putra Ayub	Penangkapan Ikan	TDKP no 46.21.9198.30.00558	-	Tidak Melakukan Kegiatan Bagan	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	
	Zona Pemanfaatan	28	KM. Waisilip 01	Penangkapan Ikan	TDKP no 46.22.9197.97.00007	-	Tidak Melakukan Kegiatan Bagan	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	
	Zona Pemanfaatan	29	Kapal Silolona	Snorkling	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
	Zona Pemanfaatan	30	Kapal Rascall	Snorkling	00420/ BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT/PAR.H/III/2024	Berlaku sekali kunjungan Selama 1 hari	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi	
	Zona Pemanfaatan	31	Kapal Sidatu Bua	Snorkling	00422/ BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT/PAR.H/III/2024	Berlaku sekali kunjungan Selama 1 hari	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Tidak Ditemukan Pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi	
	Zona Pemanfaatan	32	Kapal Star Dancer	Tracking dan Snorkling	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
16 s/d 17 Maret 2024	Zona Pemanfaatan	33	Kapal Kalea	Tracking dan Snorkling	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	

		Zona Pemanfaatan	34	Kapal Safari	Tracking dan Snorkling	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
		Zona Pemanfaatan	35	Kapal Hansal Dore	Tracking dan Snorkling	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
		Zona Pemanfaatan	36	Kapal Raja Ampat Adventure	Tracking, Snorkling dan Diving	-	-	Tidak memiliki karcis masuk kawasan dan diberikan teguran serta sosialisasi	Belum melapor kepada pengelola kawasan Konservasi Nasional	
		Zona Pemanfaatan	37	KM. Sidarmana 01	Penangkapan Ikan	TDKP no 46.22.9197.30.00022	-	Zona pemanfaatan sudah sesuai	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	
	22 s/d 25 April 2024	Zona Pemanfaatan	38	KM. Waisilip 01	Penangkapan Ikan	TDKP no 46.22.9197.97.00007	-	Zona pemanfaatan sudah sesuai	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	<p>1. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local.</p> <p>2. Peningkatan kegiatan pengawasan pada waktu dimana terjadi banyak pemanfaatan.</p> <p>3. Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik.</p>
		Zona Pemanfaatan	39	KM. Raisa 02	Penangkapan Ikan	TDKP no 45.21.9198.30.00005	-	Zona pemanfaatan sudah sesuai	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	
		Zona Pemanfaatan	40	KM. Raisa 01	Penangkapan Ikan	TDKP no 45.21.9198.30.00004	-	Zona pemanfaatan sudah sesuai	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	
		Zona Pemanfaatan	41	Kapal Nora Simrad	Snorkling	Karcis masuk kawasan konservasi	-	Memiliki karcis masuk kawasan konservasi	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	
		Zona Pemanfaatan	42	Kapal PJ. Nur Asifa	Melintas mengangkut bahan bangunan	-	-	Kegiatan pelayaran tidak melintas diatas zona inti	Belum melaporkan kepada pihak pengelola	

	27 s/d 30 Mei 2024	Zona Pemanfaatan	43	KM. Sidarmana 01	Penangkapan Ikan	TDKP no 46.22.9197.30.00022	-	Zona Pemanfaatan Sesuai.	Belum melaporkan kepada pihak pengelola		
		Zona Pemanfaatan	44	KM. Waisilip 01	Penangkapan Ikan	TDKP no 46.22.9197.97.00007	-	Zona Pemanfaatan Sesuai	Belum melaporkan kepada pihak pengelola		
		Zona Pemanfaatan	45	KM. Raisa 02	Penangkapan Ikan	TDKP no 45.21.9198.30.00005	-	Zona Pemanfaatan Sesuai	Belum melaporkan kepada pihak pengelola		
Satwas Sorong											
	04 s/d 05 Juni 2024	Zona Pemanfaatan	Tidak ditemukan adanya aktivitas kegiatan pemanfaatan didalam Kawasan Konservasi baik Zona Pemanfaatan ataupun Zona Inti hal ini disebabkan karena pada bulan Juni 2024 cuaca sangat ekstrim sehingga kegiatan yang biasa dilakukan oleh wisatawan adalah snorkeling, selam dan tracking ke puncak di Laguna Wayag didalam zona pemanfatan terbatas Subzona Pariwisata sehingga Tidak dilakukan kegiatan pengisian pada BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI.						<p>1. monitoring terhadap kegiatan patroli di Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat pada bulan-bulan yang sering terjadi kegiatan pemanfaatan di Kawasan Konservasi Waigeo Sebelah Barat khususnya di dalam Laguna Wayag Zona Pemanfaatan Terbatas Subzona Pariwisata</p> <p>2. Perlu dibentuk ulang kegiatan Forum Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi terkait, untuk perizinan berusaha dan kewenangannya oleh pelaku pemanfaat kawasan konservasi khususnya di Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut sekitarnya berdasarkan informasi dari petugas pos di Wayag;</p>		

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 25 pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dari sejumlah unit usaha tersebut, masih ada yang belum sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Terdapat 2 target yang ditetapkan dan telah terpenuhi.

Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Tabel 19 Rekap Pengawasan PRL

NO	TANGGAL PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN	PELAKU USAHA	Nomor PKKPRL	KETAATAN		REKOMENDASI
				Terbit PKKPRL	TAAT	TIDAK TAAT	
1	Tual						
1	25 Januari 2024	Ohoi Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara titik koordinat 5°39'27"S - 132°42'11" E	Nama Perusahaan : Forganza Nama Pelaku Usaha : Petronela Meyke Taliaso Jenis Usaha : Resto dan Cafe No TDUP : 503/042/VIII/TDUP/2019 Instansi Penerbit : Dinas P Luas Pemanfaatan : 240m ²	-	-	V	Pelaku Usaha Caffe & Resto Forganza agar segera melakukan pengajuan permohonan/proposal PKKPRL; Pelaku usaha Caffe & Resto Forganza agar melaporkan penyampaian telah memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
2	20 Februari 2024	Lokasi : PT. Samudera Indo Sejahtera yang beralamat di Jl. Dullah Raya KM.8, Desa/Kelurahan Ngadi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku Titik 1. 132°45'06,863" BT 5°34'28,958" LS Titik 2. 132°44'59,260" BT 5°34'20,110" LS Titik 3. 132°45'11,070" BT 5°34'11,190" LS Titik 4. 132°45'17,710" BT 5°34'19,060" LS Titik 5. 132°45'17,837" BT 5°34'19,127" LS	Nama Perusahaan : PT. Samudera Indo Sejahtera Nama Pelaku Usaha : PT. Samudera Indo Sejahtera Jenis Usaha : Aktivitas Pelabuhan Perikanan (KBLI 52224) Nomor Ijin Usaha (NIB) : 81220103840915 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : 13.92 Ha	24122110518100002 tanggal 22 Desember 2021	V	-	PT. Samudera Indo Sejahtera agar segera menyampaikan laporan berkala Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) periode laporan tahunan 2023, dan menyampaikan laporan pendirian dan /atau penempatan bangunan dan instalasi di laut.

3	03 April 2024	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku Titik 1. 132°44'35,472" BT 5°37'42,172" LS Titik 2. 132°44'30,330" BT 5°37'43,390" LS Titik 3. 132°44'27,850" BT 5°37'43,400" LS Titik 4. 132°44'27,910" BT 5°37'47,870" LS Titik 5. 132°44'30,430" BT 5°37'47,830" LS Titik 6. 132°44'33,590" BT 5°37'47,850" LS Titik 5. 132°44'34,862" BT 5°37'46,545" LS	Nama Perusahaan : PT. Pertamina Patra Niaga Nama Pelaku Usaha : PT. Pertamina Patra Niaga Jenis Usaha : Perdagangan Besar bahan bakar, cair dan gas dan produk YBDI (KBLI 46610) Nomor Ijin Usaha (NIB) : 9120309310613 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : 3,22 Ha Status Modal : PMDN	15022310518100023 terbit 15 Februari 2023	v		PT. Pertamina Patra Niaga agar segera menyampaikan laporan tahunan 2023 sebelum tanggal 15 Februari 2024 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
4.	16 May 2024	Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Mlauku Tenggara, Provinsi Maluku. Titik Kordinat : Longitude : 132.7383842 Latitude : -5.673353541	Nama Pelaku Usaha : Ronald Miron Go Jenis Usaha : Reklamasi NIB : - Dokumen PKKPR : - Luas pemanfaatan : 90 Ha.	-		v	Ronal Miron Go diminta agar segera melengkapi dokumen PKKPR
5.	20 & 21 Juni 2024	Desa Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, Propinsi Maluku, dengan titik koordinat Titik I : 132° 20' 7,158" BT - 5° 31' 48,159" LS Titik II : 132° 20' 7,868" BT - 5° 31' 48,165" LS Titik III : 132° 20' 7,850" BT - 5° 31' 48,864" LS Titik IV : 132° 20' 7,144" BT - 5° 31' 48,84" LS	Nama Pelaku Usaha : Markus Lunmisay Perusahaan : PT RAJAWALI LAUT TIMUR Jenis Usaha : Keramba Jaring Apung Sertifikat standar DPMPSTP :91202001616730192 Pembesaran Pisces/Ikan Berisip Laut (KBLI 03211) PT. Rajawali Laut Timur telah memiliki Persetujuan Pelaksanaan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 19122301181000027 yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi Maluku. Luas Pemanfaatan : 0.03 Ha.	Dokumen PKKPR Nomor 30082310518100002 Tanggal Terbit : 30 Agustus 2023		v	PT Rajawali Laut Timur agar segera mengajukan laporan revisi koordinat pada Dokumen PKKPR sesuai dengan Koordinat pada Lokasi Existing Menyampaikan Laporan tahunan yang memuat kemajuan dalam memperoleh persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha dan Realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha telah diterbitkan paling lambat tanggal 29 Agustus 2024.
2 MTB							
1	23 Februari 2024	Lokasi :Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat Titik 1. 131° 6' 12,758" BT 7° 57' 14,022" LS Titik 2. 131° 6' 13,323" BT 7° 57' 14,004" LS Titik 3. 131° 6' 13,395" BT 7° 57' 14,698" LS Titik 4. 131° 6' 12,798" BT 7° 57' 14,799" LS	Nama Perusahaan : PT. Rajawali Laut Imur Nama Pelaku Usaha : PT. Rajawali Laut Imur Jenis Usaha : Pembesaran Pisces/Ikan Berisip Laut (KBLI 03211) Nomor Ijin Usaha (NIB) : 9120200161673 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : 0.04 Ha	30082310518100000, tanggal 30 Agustus 2023	V	-	Pelaku usaha harus segera menyampaikan laporan tahunan 2024 kepada Menteri Kelautan Republik Indonesia sebelum tanggal 30 Agustus 2024, Pelaku usaha agar memperhatikan kegiatan PKKPR di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan karena mengingat Dokumen PKKPR sudah terbit sejak 30 Agustus 2023 namun sampai saat ini kegiatan usaha belum berjalan.
2	7 Maret 2024	Desa Matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Titik Kordinat: titik: Titik 1. 131° 12' 24,066" BT 8 2' 51,331" LS Titik 2. 131° 12' 24,674" BT 8 2' 51,093" LS Titik 3. 131° 12' 25,030" BT 8 2' 51,982" LS Titik 4. 131° 12' 24,447" BT 8 2' 52,195" LS Titik 5. 131° 13' 11,384" BT 8 3' 5,425" LS Titik 6. 131° 13' 12,072" BT 8 3' 5,385" LS Titik 7. 131° 13' 12,061" BT 8 3' 6,102" LS Titik 8. 131° 13' 11,402" BT 8 3' 6,138" LS	Nama Perusahaan : PT. Rajawali Laut Imur Nama Pelaku Usaha : PT. Rajawali Laut Imur Jenis Usaha : Pembesaran Pisces/Ikan Berisip Laut (KBLI 03211) Nomor Ijin Usaha (NIB) : 9120200161673 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : 0.04 Ha	25102310518100000 tanggal 17 Januari 2019	V	-	Pelaku usaha harus segera menyampaikan laporan tahunan 2024 kepada Menteri Kelautan Republik Indonesia sebelum tanggal 25 Oktober 2024, Pelaku usaha agar memperhatikan kegiatan PKKPR di Desa Matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan karena mengingat Dokumen PKKPR sudah terbit sejak 25 Oktober 2023 namun sampai saat ini kegiatan usaha belum berjalan.

3	03 April 2024	Desa Ridool, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Kepulauan tanimbar, Prov. Maluku titik koordinat 07°09'04"S 131°42'53E	Nama Perusahaan : PT. Duta Maluku Perkasa Nama Pelaku Usaha : Tantriady Setiawan Jenis Usaha : Perdagangan eceran hasil perikanan (KBLI 47215) dan Industri pendinginan/pengesan ikan (KBLI 10217) Nomor Ijin Usaha (NIB) : 0707230104892 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : 0.06 Ha			V	Pelaku usaha PT. Duta Maluku Perkasa agar segera melakukan pengurusan dokumen PKKPR, pelaku usaha agar melaporkan penyampaian telah memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
4	14-Mei-24	PT. Rajawali Laut Timur yang berlokasi di Desa Namtabung, Kec. Seluru, Kab. Kepulauan tanimbar koordinat 08°08,12"S 130°56,49"E	Nama Perusahaan : PT. Rajawali Laut Imur Nama Pelaku Usaha : PT. Rajawali Laut Timur Jenis Usaha : Pembesaran Pisces/Ikan Berisip Laut (KBLI 03211) Nomor Ijin Usaha (NIB) : 9120200161673 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : 0.04 Ha	07092310518100006 tanggal 07 September 2023	v	-	Pelaku usaha harus segera menyampaikan laporan tahunan 2024 kepada Menteri Kelautan Republik Indonesia sebelum tanggal 25 Oktober 2024, Pelaku usaha agar memperhatikan kegiatan PKKPR di Desa Matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan karena mengingat Dokumen PKKPR sudah terbit sejak 6 september 2024
5	17-Mei-24	PT. RAJAWALI LAUT TIMUR Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat 07°09'17"S 131°42'.17"E,	Nama Perusahaan : PT. Rajawali Laut Timur • Penanggung Jawab : Hasan • Jenis Kegiatan Usaha : Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut (KBLI 03211) • Lokasi : Perairan : Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. • Titik Koordinat : 07°09'17"S 131°42'45"E • Luas pemanfaatan : 11 Petak (12 m x 9 m = 108 m ² - 9 m ² = 99 m ²) • Izin Lokasi : 25/IUP.B-C/I/19K • Instansi Penerbit : Dinas PMPTSP Provinsi Maluku • Tanggal Penerbitan : 28 Januari 2019 • Nomor Induk Berusaha : 9120200161673 • Instansi Penerbit : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia • Tanggal Penerbitan : 17 Januari 2019 • PKKPR : 07092310518100014 • Instansi Penerbit : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia • Tanggal Penerbitan : 07 September 2023 • Dokumen Peizinan Lainnya (SIUP) : 25/IUP.B-C/I/19K • Instansi Penerbit : Dinas PMPTSP Provinsi Maluku • Tanggal Penerbitan : 28 Januari 2019	07092310518100014 Terbit tanggal 17 Januari 2019	v		a. Pelaku usaha harus segera menyampaikan laporan tahunan 2023 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, b. Disampaikan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki titik koordinat pada Dokumen PKKPR,

6	29-Mei-24	PT. Rajawali Laut Timur yang berlokasi di Desa Tutunametal, Kecamatan Molu Maru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat 06°47'56"S 131°33'14"E,	<p>Nama Perusahaan : PT. Rajawali Laut Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanggung Jawab : Hasan • Jenis Kegiatan Usaha : Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut (KBLI 03211) • Lokasi: Perairan : Desa Tutunametal, Kecamatan Molu Maru Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. <ul style="list-style-type: none"> • Titik Koordinat : 06°47'56"S 131°33'14"E • Luas pemanfaatan : 9 Petak (9 m x 9 m = 81 m2) • Izin Lokasi : 25/IUP.B-C/I/19K • Instansi Penerbit : Dinas PMPTSP Provinsi Maluku • Tanggal Penerbitan : 28 Januari 2019 • Nomor Induk Berusaha : 9120200161673 • Instansi Penerbit : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <p>Republik Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Penerbitan : 17 Januari 2019 • PKKPRIL : 07092310518100008 • Instansi Penerbit : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <p>Republik Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Penerbitan : 07 September 2023 • Dokumen Peizinan Lainnya (SIUP) <p>: 25/IUP.B-C/I/19K</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instansi Penerbit : Dinas PMPTSP Provinsi Maluku • Tanggal Penerbitan : 28 Januari 2019 	07092310518100008 terbit 17 Januari 2019	v		<p>a. Pelaku usaha harus segera menyampaikan laporan tahunan 2023 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,</p> <p>b. Disampaikan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki titik koordinat pada Dokumen PKKPRIL,</p>
3 Sorong							
1	20 Februari 2024	<p>Jl. Obet Rahalus No.999, Kel. Saoka, Distrik Maladum, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya</p> <p>Titik 1. 131°15' 54,684" BT 0°48'38,206" LS</p> <p>Titik 2. 131°15' 54,839" BT 0°48'38,176" LS</p> <p>Titik 3. 131°15' 59,428" BT 0°48'36,925" LS</p> <p>Titik 4. 131°16' 0,125" BT 0°48'41,227" LS</p> <p>Titik 5. 131°15' 56,370"BT 0°48'42,509" LS</p>	<p>Nama Perusahaan : PT. PAPUA RESORT (MOII PARK) Nama Pelaku Usaha : PT. PAPUA RESORT</p> <p>Jenis Usaha : Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek lainnya (KBLI 55199)</p> <p>Nomor Ijin Usaha (NIB) : 0230000932444</p> <p>Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM</p> <p>Luas Pemanfaatan : 1.87 Ha</p>	30122210519200001, tanggal 30 Desember 2022	v	-	<p>Pelaku usaha PT. PAPUA RESORT (MOII PARK) hendaknya tetap melakukan komunikasi dan pelaporan secara berkala tiap tahun melalui OSS jika terjadi perubahan dalam KBLI nya. menjaga keasrian dan kebersihan tempat usahanya karena wisata bahari Pantai Mooli Park merupakan jenis usaha dibidang jasa dimana kebersihan/ketersediaan fasilitas pendukung sangat berpengaruh terhadap animo pengunjung untuk datang kembali ke Pantai Mooli Park.</p>
2	03 April 2024	<p>Jl. Cakalang (Kuda Laut), Kompleks pelabuhan perikanan, Kota Sorong</p> <p>Titik 1: 0°88'4,209"S 131°25'225" E</p> <p>Titik 2: 0°87'9,307"S 131°25'552" E</p> <p>Titik 3: 0°87'9,117"S 131°25'21" E</p> <p>Titik 4: 0°87'7,88"S 131°25'336" E</p>	<p>Nama : PT. Marina Sorong Indonesia</p> <p>Alamat : Jl. Cakalang (Kuda Laut), Kompleks pelabuhan perikanan, Kota Sorong</p> <p>NIB : 0220003381609</p> <p>KBLI : 46206;52102;56101;10213;56301</p> <p>Skala usaha : -</p> <p>Tingkat Risiko : Menengah Tinggi</p> <p>Status Modal : PMA</p>	-		v	<p>PT. Marina Sorong Indonesia agar selalu menanyakan progress pengurusan PKKPRIL terbarunya ke pusat. Lamanya proses pembaharuan PKKPRIL dikarenakan terjadinya perubahan administrasi kependudukan dari Propinsi Papua Barat menjadi Propinsi Papua Barat Daya dimana semua dokumen-dokumen pendukung dalam permohonan harus berubah alamat surat menyuratnya.</p>

3	17-Mei-24	PT. Pertamina Patra Niaga Sorong beralamatkan di 47F2+744, Jl. Ahmad Yani, Kp. Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98411	<p>Nama Perusahaan:PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sorong Dokumen NIB: 912309310613 tanggal terbit 01 Maret 2019 Kegiatan Usaha :Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan PProdukt YBDI</p> <p>KBLI 47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji) KBLI 42912 (Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan) KBLI 20117 (Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara) KBLI 36003 (Aktifitas Penunjang Pengelolaan Air) KBLI 52221 (Aktifitas Pelayanan Kepelabuhan Laut) KBL 46691 (Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar) KBLI 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) KBLI 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya) KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL) KBLI 52103 (Aktifitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat) KBLI 62019 (Aktifitas Pemograman Komputer Lainnya) KBLI 42212 (Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase) KBLI 38220 (Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya) KBLI 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI) KBLI 47301 (Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU) KBLI 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak) KBLI 49432 (Angkutan Kendaraan Bermotor untuk Barang Khusus) KBLI 19291 (Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi) KBLI 36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku) KBLI 52101 (Pergudangan dan Penyimpan) Detail Kegiatan Usaha : Pengembangan Fuel Terminal Sorong Status Penanaman Modal: PMDN. Luas /Panjang : 5.74Ha Kedalaman : 14m</p>	PKKPRL: 03112210519200003 terbit 03 November 2022	v	Mengingat laporan kerja November 2022 – November 2023 belum diajukan, dan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sorong juga baru pertama kali mendapatkan sosialisasi dari Loka PSPL Sorong dan Satwas SDKP Sorong terkait laporan kegiatan usaha tahunan berikut sanksi administrasi yang dapat dikenakan jika belum melakukan kewajibannya, maka Polsub PWP3K dan Pengawas Perikanan merekomendasikan Pangkalan PSDKP Tual menerbitkan Surat Teguran Pertama kepada PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sorong agar segera menyelesaikan kewajiban pelaporan kegiatan usanya dalam tahun kerja tersebut di atas
---	-----------	--	---	---	---	--

4	27-Mei-24	PT. Bagus Jaya Abadi beralamat di jl. Gunung semeru No. 1A, Kota Sorong, Prov Papua Barat, 98414 koordinat Lintang Bujur: § 131°14'53,650"BT; 0°49' 11,248"LS § 131°14'58,967"BT; 0°49' 09,311"LS § 131°14'59,766"BT; 0°49' 08,508"LS § 131°15'00,068"BT; 0°49' 07,374"LS § 131°15'01,678"BT; 0°49' 06,031"LS § 131°14'59,215"BT; 0°49' 09,750"LS § 131°14'53,664"BT; 0°49' 11,471"LS	Nama Pelaku Usaha : PT BAGUS JAYA ABADI Nomor Induk Berusaha : 9120007220944, tanggal terbit 29 Desember 2022 dengan konsentrasi usaha pada beberapa KBLI diantaranya: KBLI 08999 (Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl) KBLI 19101 (Industri Penggajian Kayu) Status Penanaman Modal: PMDN. NPWP : 02.565.797.4-951.000 Alamat Kantor : Jl. Gunung Semeru No. 1A, Kel Klauur, Sorong Kota, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya Status Penanaman Modal : PMDN Kegiatan Usaha : Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl Detail Kegiatan Usaha : Fasilitas Penunjang Usaha Penambangan Batuan Andesit Lokasi Usaha : Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya Nama Perairan/Laut : Selat Dampier Luas /Panjang : 0.33Ha Kedalaman : 94m	01082210519200001 terbit 1 Agustus 2022	v		1. Sejak terbitnya PKKPRL tertanggal 01 Agustus 2022, PT Bagus Jaya Abadi baru pertama kali mendapatkan sosialisasi dari Loka PSPL Sorong dan Satwas SDKP Sorong terkait laporan kegiatan usaha tahunan berikut sanksi administrasi yang dapat dikenakan jika belum melakukan kewajibannya. Oleh karenanya Polsus PWP3K dan Pengawas Perikanan merekomendasikan Pangkalan PSDKP Tual menerbitkan Surat Tegurak Pertama kepada PT Bagus Jaya Abadi agar segera menyelesaikan kewajiban pelaporan kegiatan usanya dalam tahun kerja tersebut di atas; 2. PT Bagus Jaya Abadi agar segera melaporkan kembali usaha apabila pelaku usaha memiliki rencana untuk melakukan perubahan luasan area usaha dan/atau memirikan instalasi/ bangunan di atas laut.
5	14-Mei-24	Nama Perusahaan : PT DOKINDO AIMAS PAPUAAalamat Kantor/Korespondensi : Jalan Pengalengan Klalin, Kel. Klabinain, Kec. Aimas, Kab.Sorong, Prov. Papua BaratNomor Telepon : 082197963822	Nama Perusahaan : PT DOKINDO AIMAS PAPUAAalamat Kantor/Korespondensi : Jalan Pengalengan Klalin, Kel. Klabinain, Kec. Aimas, Kab.Sorong, Prov. Papua BaratNPWP : 02.112.794.9- 951.000Nomor Telepon : 082197963822Nomor Fax : -Email : roesdianto007@gmail.comKode dan Nama KBLI : 30111 INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU30112 INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DANBANGUNAN TERAPUNG30113 INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DANBAGIAN KAPAL33151 REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNANTERAPUNG41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL52101 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANANStatus Penanaman Modal : PMDNJenis API : API- PStatus API : AktifAkses Kepabeanaan : Impor	06102310519600002 terbit 6 Oktober 2023	v		Pelaku usaha harus segera menyampaikan laporan tahunan 2024 kepada Menterinsebelum tanggal 6 Oktober 2024Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,
6	14-Mei-24	PT. Semen Indonesia beralamat di kawasan industri Arar, Kab. Sorong, Prov Papua Barat kordinat 131°14'28,394"BT- 1°1'51,523"LS 131°14'21,469"BT- 1°1'51,524"LS 131°14'21,469"BT- 1°1'52,356"LS 131°14'16,090"BT- 1°1'52,349"LS 131°14'16,084"BT- 1°1'44,375"LS 131°14'21,768"BT- 1°1'44,375"LS 131°14'21,768"BT- 1°1'44,976"LS 131°14'26,777"BT- 1°1'44,971"LS	Nama Perusahaan : PT. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Semen Indonesia,TBK Nama Pelaku Usaha : PT. Semen Indonesia Jenis Usaha : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(TUKS) KBLI 82920) Nomor Ijin Usaha (NIB) : 8120214023617 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : 7,85 Ha Status Modal : PMDN	22122310519200001 terbit 22 Desember 2023	v		Agar mulai menyicil laporan kegiatan usaha berkala sebagai pertanggungjawaban pelaku usaha pada saat memperoleh dokumen PKKPRL tersebut di atas. Dimulainya membuat laporan karena terdapat sanksi administrasi denda paling banyak Rp 5.000.000,- /hari bagi pelaku usaha yang terlambat menyampaikan laporan kegiatan usaha berkalanya
5	Timika						

1	7 Maret 2024	Amamapare Kecamatan Mimika Timur Jauh Kab.Mimika Provinsi Papua Tengah	Nama : PT. FREEPORT INDONESIA Alamat : Desa Amamapare Kec.Mimika Timur Jauh Kab.Mimika Prov.Papua Tengah PT.Freeport Indonesia NIB : - KBLI : - Skala usaha : - Tingkat Risiko : - Status Modal : -	-		V	pelaku usaha PT. Freeport Indonesia agar segera melakukan pengajuan permohonan/proposal PKKPR; Pelaku usaha PT. Trisima Indonusa agar melaporkan penyampaian telah memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
		Titik 1. 136°37'39,76" BT 04°55'43,13" LS					
		Titik 2. 136°39'39,90" BT 04°55'40,66" LS					
		Titik 3. 136°39'36,97" BT 04°57'12,90" LS					
		Titik 4. 136°37'42,20" BT 04°57'14,98" LS					
6	Kaimana						
1	04 April 2024	Teluk Bitsyari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.	Nama Perusahaan : PT. Amera Nus Penanggung Jawab : - Andreas Eduardus (Lokasi Teluk Bitsyari) Jenis Kegiatan Usaha : Pembesaran Mollusca Laut /Budidaya Mutiara (KBLI - 03215) Lokasi: Perairan : Teluk bitsyari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Luas pemanfaatan : - Lokasi Teluk Bitsyari 9. 22 Ha Nomor Induk Berusaha : 8120002732305 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tanggal Penerbitan : 20 Juli 2018 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	Lokasi Teluk Bitsyari no. 20032310519200002 terbit 20 maret 2023	v		PT. Amera Nus segera harus segera menyampaikan laporan tahunan 2024 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
2	04 April 2024	Teluk kayu Merah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.	Nama Perusahaan : PT. Amera Nus Penanggung Jawab : - Andreas Eduardus (Lokasi Teluk Bitsyari)-Fransiskus Ohoiwutun (Lokasi Teluk kayu Merah) Jenis Kegiatan Usaha : Pembesaran Mollusca Laut /Budidaya Mutiara (KBLI - 03215) Lokasi: Perairan : Teluk kayu Merah dan Teluk Bitsyari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Luas pemanfaatan :- Lokasi Teluk Bitsyari 9. 22 Ha- Lokasi Teluk kayu Merah 14. 26 Ha Nomor Induk Berusaha : 8120002732305 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tanggal Penerbitan : 20 Juli 2018 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	- Lokasi Teluk kayu Merah no. 10022310519200001 terbit 10 Februari 2023	v		PT. Amera Nus segera harus segera menyampaikan laporan tahunan 2024 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
7	Raja Ampat						
1	8 Februari 2024	Lokasi : Pulau Birie kampung Arefi Distrik Waigeo Batanta Utara, kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Nama Perusahaan : PT. Seahorse Paradise Nama Usaha : Papua Paradise Eco Resort Penanggungjawab : Fricilia Moningka Jenis Usaha : Pariwisata Alam Perairan NIB : 9120300371036 Instansi penerbit : Menteri Investasi/BKPM Tanggal Penerbit : 27 September 2022 Luas Pemanfaatan : 2.24 Ha	Menunggu Terbit PKKPR pada Sistem OSS	V	-	Pelaku Usaha PT. Seahorse paradise disarankan untuk berkomunikasi lebih efektif dan agar melaporkan penyampaian telah memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

2	7 Februari 2024	Lokasi: pesisir Pulau Duyef Distrik Waigeo Barat, kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya 130°15' 434'BT 00°11'296'5' LS	Nama Perusahaan : PT. Cendana Indopearl Nama Pelaku Usaha : Penanggungjawab : Nofi, Elisabeth Ndolu Jenis Usaha : Budidaya Kerang Mutiara NIB : 8120201932048 Instansi penerbit : Menteri Investasi/BKPM Tanggal Penerbit : 21 Februari 2023 Luas Pemanfaatan : 14,89 Ha	Menunggu Terbit PKKPRL pada Sistem OSS	V		Pelaku Usaha PT. Cendana Indopearl disarankan untuk berkomunikasi lebih efektif dan agar melaporkan penyampaian telah memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
3	07-Mar-24	Kampung Pulau Finkawut Kampung Kalobo Distrik Salawati Tengah, kabupaten Raja Ampat, koordinat :1°5'27.00"S 131° 6'5.39"E	Nama : Godlif Selmury Alamat : Pulau Finkawut, Kampung Kalobo, Distrik Salawati Tengah, Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat Daya NIB : 2705220046749 KBLI : 03215 (Pembesaran Molusca Laut) Skala usaha : Mikro Tingkat Risiko : Menengah Rendah Status Modal : PMDN	-	V		Pelaku Usaha Goldlife Selmury agar segera melakukan pengajuan permohonan/proposal PKKPRL; Pelaku usaha Goldlife Selmury agar melaporkan penyampaian telah memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
4	17-Apr-24	Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat, Kab. Raja Ampat. Prov. Papua Barat Koordinat : 0°18'43.15"S 130°21'55.38"E	Nama : Sadi Kaidi (CV. Putra Raja Bahari) Alamat : Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat, Kab. Raja Ampat. Prov. Papua Barat NIB : 1308230047815 KBLI : 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut) Skala usaha : Mikro Tingkat Risiko : Menengah Rendah Status Modal : PMDN	-	V		Pelaku Usaha Goldlife Selmury agar segera melakukan pengajuan permohonan/proposal PKKPRL; Pelaku usaha Goldlife Selmury agar melaporkan penyampaian telah memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
5.	15-Mei-24	Pulau Gam, Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, kabupaten Raja Ampat	Nama Usaha : Kabui Mutiara sejahtera Nama Perusahaan : PT. Kabui Mutiara Sejahtera Alamat Kantor : Bukit golf Internasional GA 5 no 16, Desa/Kelurahan Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos : 60219 Lokai Proyek : Pulau Gam, Kampung Arefei Distrik Batanta Utara kab. Raja Ampat Penanggung Jawab : Syarifudin	-	V		1. Perlunya sosialisasi peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan peraturan yang wajib ditaati oleh para pelaku usaha dibidang pemanfaat ruang laut. 2. Perlunya kerjasama antar instansi terkait agar penataan pemanfaatan ruang laut yang ada dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada.

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 29 pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Apabila mengacu kepada target yang diberikan, Pangkalan PSDKP Tual sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3 untuk pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES.

Kegiatan pendukung utama jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi Pengawasan Pengelolaan Jenis ikan yang dilindungi. Pengawasan ini belum termasuk

dengan adanya laporan warga atau nelayan kecil yang mendapati adanya jenis ikan dilindungi yang tidak sengaja masuk dalam jaring atau tertangkap saat memancing.

Berbagai upaya telah dilakukan pangkalan PSDKP Tual terhadap kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi sebagai bagian penyadartahuan kepada masyarakat terkait larangan dan tujuan pelarangan tersebut dan dampaknya bagi ekologi sekitar. Sebagai salah satu fenomena yang terdapat dalam wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual terutama di wilayah Maluku Tenggara terkhususnya kepulauan kei terdapat pemanfaatan Tabob (penyu belimbing) dalam ritual adat dan menjadi makanan, tidak hanya itu masyarakat Pulau Ut yang ada di kepulauan Kei juga dikenal mengkonsumsi dugong yang merupakan jenis ikan dilindungi atau penangkapan ikan napoleon dengan ukuran yang dilarang. Berikut merupakan tabel pengawasan jenis ikan dilindungi

Tabel 20 Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi

NO	TGL PENGAWASAN	LOKASI	PELAKU USAHA	JENIS IKAN	DOKUMEN PERIZINAN	PENERBIT IZIN	HASIL PENGAWASAN
A. PANGKALAN PSDKP TUAL							
1.	01-Mar-24	Desa Fiditan, Kota Tual. Dengan koordinat -5.609290 S - 132.752329 BT	Said Ode Ibrahim	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 24112100627360003 Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) : I - 202209131013243238233 SK Penetapan Kuota Pengambilan/Ekspor : B.100/LPSPL.1/PRL.430/1/2024 Surat Angkt Jenis Ikan (SAJI) : 00071/SAJI/DN/LPSPL.1/1/2024	BKPM	Pelaku Usaha Said Ode Ibrahim memiliki NIB dan SIPJI yang artinya Said Ode Ibrahim Taat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
B. SATWAS SDKP KAIMANA							
1.	19-Jan-24	Pasar ikan yang berada di Pasar ikan Kaimana, Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dengan titik Koordinat 03°38'53"LS – 133°44'1"BT	Ibrahim	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	-	-	Sesuai hasil pengawasan dan wawancara dengan Bpk Ibrahim yang merupakan salah sorang pedagang ikan di pada pasar kaimana diketahui bahwa ikan yang dijual merupakan hasil tangkapan nelayan kecil/lokal yang aktifitas penangkapannya dilakukan di perairan Kab.Kaimana sesuai informasi yang di dapatkan alat tangkap yang digunakan berfariasi antara lain "Gillnet, Bagan dan Pancing Ulur" hasil tangkapan pun beragam, yakni Ikan Kuwe, cumi, udang dan Ikan Kembang.

2.	21-Feb-24	Kegiatan pengawasan dilaksanakan di UPI milik Kholil Yusuf yang berada di Jl. R.A Kartini kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat dengan titik Koordinat 03°39'54.96"LS – 133°45'35.59848"BT	Kholil Yusuf	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120004490816 Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) : I- 202210101326055108525 SK penetapan kuota pengambilan /Ekspor: B.100/LPSP.L.1/PRL/RL.530/I/2024 Surat Izin Pengumpul Hasil Perikanan (SIPHP) : 523.3/16/SIPHP/DPMPSTP-TK/2023	Penerbit OSS	Pada saat pengawasan di lapangan tidak ditemukan adanya pemanfaatan jenis ikan yang tergolong dalam Jenis Ikan dilindungi dan/atau yang termasuk dalam Appendix II CITES sesuai peraturan perUndang undangan yang berlaku. Selain itu dokumen perizinan usaha pun telah terlaksana sesuai peraturan per-undang undangan
3	25-Mar-24	Pasar ikan yang berada di Pasar ikan Kaimana, Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dengan titik Koordinat 03°38'53"LS – 133°44'1"BT	Dedi Setiawan	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	-	-	Sesuai hasil wawancara dengan Bpk Dedi Setiawan yang merupakan salah sorang pedagang ikan di pada pasar kaimana diketahui bahwa ikan yang dijual merupakan hasil tangkapan nelayan kecil/lokal yang aktifitas penangkapannya dilakukan di perairan Kab.Kaimana sesuai informasi yang di dapatkan alat tangkap yang digunakan bervariasi antara lain "Gillnet, Bagan dan Pancing Ulur" hasil tangkapan pun beragam, yakni Ikan Kuwe, cumi, udang, Ikan Kembung, Cakalang, Tenggiri dan Kakap merah
4.	22-Apr-24	Kegiatan pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi, dilaksanakan di pasar ikan yang berada di Pasar ikan Kaimana, Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dengan titik Koordinat 03°38'53"LS – 133°44'1"BT	Bapak Nurddin	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	-	-	Sesuai hasil wawancara dengan Bpk Nurddin yang merupakan salah sorang pedagang ikan di pada pasar kaimana diketahui bahwa ikan yang dijual merupakan hasil tangkapan nelayan kecil/lokal yang aktifitas penangkapannya dilakukan di perairan Kab.Kaimana sesuai informasi yang di dapatkan alat tangkap yang digunakan bervariasi antara lain "Bagan, Pancing Ulur dan Gillnet" hasil tangkapan pun beragam, yakni Ikan cumi, udang, Ikan Kembung, ikan Kuwe, ikan Cakalang, ikan Tenggiri dan ikan Kakap merah

5.	08-Mei-24	Pasar ikan yang berada di Pasar ikan Kaimana, Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dengan titik Koordinat 03°38'53"LS – 133°44'1"BT	Ilham (Pemilik/Pedagang ikan enceran)	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120203231753 Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP): Ada	Penerbit OSS	Sesuai hasil wawancara dengan Bpk Ilham yang merupakan salah seorang pedagang ikan di pada pasar kaimana diketahui bahwa ikan yang dijual merupakan hasil tangkapan nelayan kecil/lokal yang aktifitas penangkapannya dilakukan di perairan Kab.Kaimana sesuai informasi yang di dapatkan alat tangkap yang digunakan bervariasi antara lain "Bagan, Pancing Ulur dan Gillnet" hasil tangkapan pun beragam, yakni cumi, udang, ikan Kembang, ikan Kuwe, ikan Cakalang, ikan Tenggiri dan ikan Kakap merah
5.	21-Jun-24	Pasar Ikan yang berada di Pasar ikan Kaimana, Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dengan titik Koordinat 03°38'53"LS – 133°44'1"BT	Suardi (Pemilik/Pedagang ikan enceran)	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	-	-	Sesuai hasil wawancara dengan Bpk Suardi yang merupakan salah seorang pedagang ikan di pada pasar kaimana diketahui bahwa ikan yang dijual merupakan hasil tangkapan nelayan kecil/lokal yang aktifitas penangkapannya dilakukan di perairan Kab.Kaimana sesuai informasi yang di dapatkan alat tangkap yang digunakan bervariasi antara lain "Bagan, Pancing Ulur dan Gillnet" hasil tangkapan pun beragam, yakni ikan kembang, ikan tongkol, ikan tenggiri dan ikan manyung.
5.	23-Jul-24	UPI milik Sutrisno yang berada di Jl. Nikolas Kabes. kec. Kaimana Kab. Kaimana, Prov. Papu Barat dengan titik koordinat 03°40'5"LS– 133°45'48"BT	Sutrisno	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	Nomor Induk Berusaha : 0220001782017 Nomor ID Izin SIPJI Perdagangan DN : I-202303211208081231947	Penerbit OSS	Sesuai hasil pengawanan secara langsung di lapangan tidak ditemukan adanya pelanggaran, izin telah lengkap dan sesuai kegiatan dan pemanfaatan sesuai peraturan perUndang- Undangan yang berlaku.
C. SATWAS SDKP MTB							
1	22-Jan-24	Pengumpul hasil perikanan milik UD. Kirana Mina Laut, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar. Dengan titik koordinat 07° 58' 33,659" LS dan 131° 17' 58,463" BT	Dwi Agus Satria M. W (UD Kirana Mina Laut)	- Napoleon- Hiu Paus- Pari Manta- Terubuk	NIB : 9120204200186	Penerbit OSS	Pengawasan pada Pengumpul Hasil Perikanan Milik UD. Kirana Mina Laut, Kec.Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditemukan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya yaitu Hiu dan Pari.
2	26 Februari 2024	Pengumpul hasil perikanan milik UD. Bunga Kembar, Kelurahan Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar. Dengan koordinat 07° 59' 11" LS dan 131° 17' 12" BT.	Arsady (UD. Bunga Kembar)	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 9120006241691	Penerbit OSS	Pengawasan pada Pengumpul Hasil Perikanan Milik UD. Bunga Kembar, Kec.Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditemukan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya yaitu Hiu dan Pari.
D. SATWAS SDKP MERAUKE							

1.	17-Jan-24	Hengki Tjong Jl. Raya Mandala Muli, Kel. Muli, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan dengan koordinat 8°30'50"LS dan 140°24'19" BT.	Hengki Tjong	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 1295000310128 SIPJI : I- 202304021146243228129	Penerbit OSS	Pada saat pengawasan dilapangan, kode dan nama KBLI yang tercantum dalam NIB sudah sesuai dengan jenis pemanfaatannya yaitu KBLI 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES. - Jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan sudah sesuai - Ketentuan dan peraturan yang berlaku terlaksana seluruhnya
2.	21-Feb-24	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di Agus Gunawan, Jl. Parakomando, Kel. Mandala, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan dengan koordinat 8°29'51"LS dan 140°23'45" BT.	Agus Gunawan	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 0211010062467 SIPJI : I- 202304262118291762587	-	Pada saat pengawasan dilapangan, kode dan nama KBLI yang tercantum dalam NIB sudah sesuai dengan jenis pemanfaatannya yaitu KBLI 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES. - Jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan sudah sesuai - Ketentuan dan peraturan yang berlaku terlaksana seluruhnya - Indikasi pelanggaran: tidak ada
3.	26-Mar-24	Kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan di CV. Bintang Fahri Internasional, Jl. Ternate GG Hj. Kasim, Kel. Seringgu, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan dengan koordinat 8°30'44"LS dan 140°23'00" BT.	Nina Budiarti (CV. Bintang Fahri Internasional)	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 8120102801461 SIPJI DN : 53/1/KKP/2021 SIPJI LN : 52/1/KKP/2021	Penerbit OSS	Pada saat pengawasan dilapangan, kode dan nama KBLI yang tercantum dalam NIB sudah sesuai dengan jenis pemanfaatannya yaitu KBLI 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES serta KBLI (46206) Perdagangan Besar Hasil Perikanan. - Jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan sudah sesuai - Ketentuan dan peraturan yang berlaku terlaksana seluruhnya
4.	18-Apr-24	Pelaku usaha perseorangan atas nama Iramawarni A. Ningtiyas, Jl. Polder Dalam III, Kel. Maro, Kec. Merauke, Kab. Merauke – Papua Selatan dengan koordinat 8°29'08" LS dan 140°23'56" BT.	Iramawarni A. Ningtiyas	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 1281000302879 SIPJI : 122/1/KKP/2021	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
5.	15-Mei-24	Pelaku usaha perseorangan atas nama Ruslan, Jl. Gudang Arang, Kel. Kamahedoga, Kec. Merauke, Kab. Merauke – Papua Selatan dengan koordinat 8°28'06"LS dan 140°23'42" BT.	Ruslan	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 9120002892521 SIPJI : 9120002892521	Penerbit OSS	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi

6.	13-Jun-24	Pelaku usaha perseorangan atas nama PT. Surya Maro Sakti, Jl. Gudang Arang, Kel. Kamaheadoga, Kec. Merauke, Kab. Merauke – Papua Selatan dengan koordinat 8°28'06" LS dan 140°23'42" BT.	Edy Lie (PT. Surya Mako Sakti)	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 0072/26-06/PK/1/2017 SIUP : 0072/26-06/PK/1/2017 SIPJI : 13/1/KKP/2020	KBKPM	Dari hasil pengawasan yang dilakukan, seluruh ketentuan telah terpenuhi
E. SATWAS SDKP SORONG							
F. SATWAS SDKP MIMIKA							
1.	17-Jan-24	Kapal Ikan Sari Mulya 1 Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah. Dengan titik koordinat 4.797635" S – 136.772112" T	Akhmad Sodikun (KM. Sari Mulya 1 (Kapal Penangkap Ikan))	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 0411210032843	-	Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi pada salah Satu Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan perikanan yang berlokasi di Jl. Kompleks PPI. Poupako Kecamatan Mimika Timur ,Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tidak ditemukan Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya.
2.	16-Feb-24	Kapal ikan Sari Mulya Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah. Dengan titik Koordinat 4.797635" S – 136.772112" T	Akhmad Sodikun (KM. Sari Mulya (Kapal Penangkap Ikan))	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 0411210032843	-	Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi pada salah Satu Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan perikanan yang berlokasi di Jl. Kompleks PPI. Poupako Kecamatan Mimika Timur ,Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tidak ditemukan Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya.
3.	18-Mar-24	Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Milik CV.Seafood Sejahtera Papua yang berlokasi di Jln.Kompleks PPI.Poupako,Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah, dengan titik Koordinat 5.795149"S – 136.769478"T	Dedy Haryanto (CV. Seafood Sejahtera Papua)	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 1239000202578	-	Pengawasan pada Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Milik CV.Seafood Sejahtera Papua,di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah ditemukan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya yaitu: ditemukan Ikan Tongkol,IkanTenggiri,Ikan Kakap Merah,Ikan Kaci – Kaci,Ikan Kuwe,Ikan Kembung,Ikan Kutila dan Ikan Bawal Hitam.
4.	17-Apr-24	Kapal Penangkapan ikan yang berbuah di Pelabuhan Perikanan Poupako Distrik Mimika Timur Kab.Mimika Provinsi Papua Tengah Dengan titik Koordinat 4.797635" S – 136.772112" T	Susanto Ang (KM. Salsabila A1)	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 9120010000399	-	Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi pada salah Satu Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan perikanan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Poupako Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tidak ditemukan Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya.

5.	22-Mei-24	Jln. Kompleks PPI.Poumako Distrik MimikaTimur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah. Dengan titik Koordinat 4.797656" S – 136.772536" T	Yanto (KM. Titanic) (Kapal Penangkap Ikan)	- Napoleon- Hiu Paus- Pari Manta- Terubuk	NIB : 1901220011464	-	Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi pada salah Satu Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan perikanan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Poumako Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tidak ditemukan Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya.
6.	18-Jun-24	KM Nirawan 47 yang berada di Jln. Kompleks PPI.Poumako Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah. Dengan titik Koordinat 4.797226" S – 136.772774" T	Haeria (KM. Nirwana 47) (Kapal Penangkap Ikan)	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 1901220011464	-	Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi pada salah Satu Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan perikanan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Poumako Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tidak ditemukan Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya.
G. WILKER PSDKP DOBO							
1.	28-Mei-24	CV. Mitra Leo Group yang beralamat di Jalan Gosamtian Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. dengan titik Koordinat (5°45'50"S - 134°13'9"E).	Albertus Glerando Horas (CV. Mitra Leo Group)	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 8120013190586	Penerbit OSS	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pelaku usaha milik CV. Mitra Leo Group telah memiliki Perizinan Berusaha KBLU 03151 yaitu Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES namun pada kenyataannya pelaku usaha tidak menjalankan kegiatan usahanya sehingga ada indikasi pelanggaran;
2.	11-Jul-24	Pelaku Usaha RINTO SUKANDAR yang beralamat di Jalan RAJA SAM, Desa/kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. dengan titik Koordinat (5°45'37.52"S - 134°13'55.20"E).	Rinto Sukandar	- Napoleon -Hiu Paus -Pari Manta -Terubuk	NIB : 1605220005323	Penerbit OSS	Pelaku usaha memanfaatkan jenis ikan tidak sesuai dengan kuota yang ditetapkan dan pelaku usaha belum memiliki SAJIDN
H. WILKER PSDKP RAJA AMPAT							
I. WILKER PSDKP FAK-FAK							
1.	23-Jan-24	Unit Pengolahan Ikan milik Bapak SUBIKI yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Dengan titik koordinat -2.928870150162377 - 132.270314544443932	Subiki (PT. Mulia Perikanan Indonesia) (Unit Pengolahan Ikan)	-Lobster -Kepiting -Rajungan	NIB : 1806220020086	-	Pada bulan Januari 2024 telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi dan diperoleh hasil pengawasan bahwa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang dilakukan oleh Bapak Subiki dinyatakan taat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan.

2.	20-Feb-24	Usaha Pengolahan Ikan milik Bapak Keseng, PT. Mulai Perikanan Indonesia berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Dengan koordinat -2.9269232280977837 132.2701083496213	Keseng (PT. Mulia Perikanan Indonesia) (Usaha Pengolahan Ikan)	- Napoleon - Hiu Paus - Pari Manta - Terubuk	NIB : 9120210040477	-	Pada bulan Februari 2024 telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi dan diperoleh hasil pengawasan PT. Mulia Perikanan Indonesia tidak memanfaatkan jenis ikan dilindungi sehingga dinyatakan taat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan.
3	20-Mar-24	PT. Indoprima Utama Mina yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Komplek PPI Dulan Pokpok Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Titik Kordinat : -2.9271294887489345 132.2669054567814	PT. Indoprima Utama Mina (Kaslim)	- Pari Kupu-kupu - Pari Kikir - Pari Lontar - Hiu Lanjaman - Hiu Martil	NIB : 1806220020086	DPM PTSP	Hasil pemeriksaan Usaha Pengolahan Ikan milik PT. Indoprima Utama Mina tidak memanfaatkan Jenis Ikan Dilindungi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan bahwa Jenis Ikan yang di olah sesuai dengan Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang meliputi Ikan Pelagis Beku, Ikan Domersal Beku, Udang Beku.
4	13-Mei-24	PT. Marine Gratia Indonesia yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Komplek PPI Dulan Pokpok Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Titik Kordinat : -2.9279384587285113 - 132.26722229272127	PT. Marine Gratia Indonesia (Hadi Susanto)	- Pari Kupu-kupu - Pari Kikir - Pari Lontar - Hiu Lanjaman - Hiu Martil	NIB : 1219000322726	DPM PTSP	Dari hasil pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan dengan penanggungjawab PT. Marine Gratia Indonesia diperoleh informasi bahwa bahan baku diperoleh dari kapal perikanan dan nelayan lokal tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Fakfak. Dimana nelayan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Kapal dan Perahu Jukung. Bahan baku diperoleh dengan kondisi Segar. Jenis ikan yang diolah meliputi Ikan Kakap merah, Tenggiri, Kerapu.
5	19-Jun-24	CV. Irian Perkasa Indah berlokasi di Jl. Letda Dirwan Kelurahan Wagom Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Titik Kordinat :	Zulfa Musa'ad (CV. Irian Perkasa)	- Pari Kupu-kupu - Pari Kikir - Pari Lontar - Hiu Lanjaman - Hiu Martil	NIB : 1219000322726	DPM PTSP	Pada bulan Juni 2024 telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi dan diperoleh hasil pengawasan bahwa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang dilakukan oleh CV. Irian Perkasa Indah dinyatakan taat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan.

a.5 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 11 pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dari sejumlah unit usaha tersebut, masih ada yang belum sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Terdapat 1 target yang ditetapkan.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil meliputi pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Berikut data pengawasan pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan lingkup Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 21 Rekap pengawasan PWP3K

No	Jenis IKU	Pelaku Usaha	Waktu Pengawasan	Lokasi	Jenis kegiatan	Dokumen perizinan
1	Reklamasi	Ronald Miron Goo (perorangan)	20 Maret 2024	Langgur Kab Maluku Tenggara	Penimbunan	
2	Pulau-Pulau Kecil	Cave n Resto Forganza	23 April 2024	Ohoi Loon Kecamatan Kei Kecil Kab Maluku Tenggara	Cave n Resto	NIB : 2911220051347 Tanggal Terbit : 29 Nov 2022 Penerbit : Menteri Investasi BKPM Peruntukan : Rumah/warung makan PKKPR : Masih dalam Prose
3	Reklamasi	Ronald Miron Goo (perorangan)	13 Mei 2024	Langgur Kab Maluku Tenggara	Penimbunan	-
4	Wilayah Pulau-pulau kecil PMDN	PT. Rajawali Laut Timur (Pulau Larat)	22 Februari 2024	Pulau Larat Kecamatan Tanimbar Utara, Kab Kepulauan Tanimbar TitikKoordinat 07° 08.983' LS - 131° 42.824	Keramba Jaring Apung	NIB : 9120200161673 Tanggal Terbit : 24 September 2018 perubahan ke -17 tanggal 21 Februari 2023 Penerbit OSS PKKPR : 07092310518100014 Luas : 0.03 Ha Kedalaman : 4 M Terbitkan Tanggal : 7 September 2023 Penerbit : OSS SIUP : 25/IUP.B-C/1/19K Tanggal Terbit : 28 Januari 2019 Penerbit : DPMPTSP Provinsi Maluku Peruntukan Pengumpulan, Pengangkutan, dengan Pemasaran ikan Kerapu Hidup
5	Pulau-Pulau Kecil PMDN	PT. Rajawali Laut Timur (Pulau Matakus)	25 Maret 2024	Pulau Matakus Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab Kepulauan Tanimbar Titik Koordinat 08° 05'00" S - 131° 11'30" E	Keramba Jaring Apung	NIB : 9120200161673 Tanggal Terbit : 17 Januari 2019 perubahan ke -1 tanggal 7 Oktober 2021 Penerbit OSS PKKPR : 25102310518100007 Luas : 0.11 Ha Kedalaman : 4 M Terbitkan Tanggal : 25 Oktober 2023 Penerbit : OSS
6	Pulau-Pulau Kecil PMDN	PT. Duta Maluku Perkasa	25 April 2024	Desa Ridoool Kecamatan Tanimbar Utara, Kab Kepulauan Tanimbar Titik Koordinat 07°08'55"S - 131°43'42"E	Coldstorage penampung ikan	NIB : 0707230104892 Tanggal Terbit : 7 Juli 2023 Penerbit OSS
7	Pulau-Pulau Kecil PMDN	PT. Rajawali Laut Timur	27 Mei 2024	Pulau Namtabung Kecamatan Selaru Kab Kep Tanimbar Titik Koordinat 08°08'12"S - 130°56'49"E	Keramba Jaring Apung	NIB : 9120200161673 Tanggal Terbit : 17 Januari 2019 Perubahan Ke-1 Tanggal 7 Oktober 2021 Penerbit OSS PKKPR : 07092310518100006 Luas : 0,04 Ha Kedalaman : 4 m Tanggal Terbit : 7 September 2023 Penerbit OSS

8	Pulau-Pulau Kecil PMDN	CV. Diana Indah Dewata	11-Jun-24	Pulau Selaru, Desa Namtabung, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar dengan koordinat 08°08'12"S 130°56'49"E.	Keramba Jaring Apung	NIB : 1104230054085 Tanggal terbit : 11 April 2023 Penerbit OSS
9	Wilayah Pulau-pulau kecil PMA	Papua Paradise Eco Resort	30 Januari 2024	Pulau Birie, Kampung Arefi Distrik Bantata Utara, Raja Ampat Titik Koordinat 0°46'14.40"S 130°44'49.32"E	Wisata Alam Perairan/Wisata Bahari	NIB : 9120300371036 Diterbitkan Tanggal : 13 Maret 2019 Penerbit OSS Ijin PKKPR : 27092210219205009 Diterbitkan Tanggal : 27 September 2022 Penerbit : OSS ijin Pemanfaatan pulau-pulau kecil : -
10	Pulau-Pulau Kecil PMA	PT. Cendana Indopearls	6 Februari 2024	Kampung Selpelle Teluk Aljui, Pulau Duyef Titik Koordinat 0°11'25.82"S 130°15'39.79"E	Budidaya Perikanan	NIB : 8120101932048 Diterbitkan Tanggal : 24 September 2018 perubahan ke 17 Tanggal 21 Februari 2023 Penerbit OSS Ijin PKKPR : - ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil : -
11	Pulau-Pulau Kecil PMDN	Godlif Summury	20 Maret 2024	Kampung Sakabu Distrik Salawati Tengah Titik Koordinat 1° 4'35.51"S 131° 7'41.67"E	Budidaya Perikanan	NIB : 2705220046749 Diterbitkan Tanggal : 27 Mei 2022 perubahan ke 1 Tanggal 1 Juni 2022 Penerbit OSS Ijin PKKPR : - ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil : -

a.6 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 30 unit kapal Pelaku Usaha perikanan yang bebas dari kegiatan *Destructive Fishing*. Dari 30 pelaku usaha yang telah diawasi ditemukan 1 pelanggaran *destructive fishing* yang telah dijatuhi hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp100.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara, selebihnya 29 unit telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya dengan tidak ditemukannya bahan ataupun alat yang merusak dalam kegiatan penangkapan ikan.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku Usaha perikanan yang bebas dari kegiatan *Destructive Fishing* meliputi pengawasan pada kapal – kapal dibawah 10 GT, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual.

Berikut akan ditampilkan kumpulan data nelayan yang telah diperiksa dalam rangka pengawasan penangkapan ikan merusak :

Tabel 22 Rekap pengawasan DF

No.	Tgl Pelaksanaan	Nama Kapal	Ukuran GT	Penanggung Jawab Kapal / Pemilik		Alat Tangkap Lainnya/ Jenis Alat Tangkap Ikan	Jenis SDI	Fisik Ikan Hasil Tangkapan	Lokasi Penangkapan	Satwas	Rekomendasi/ Tindakan
				Nama	Alamat						
1	19 Januari 2024	Longboat / Jukung	1	Sulaiman Silaratubun	Desa Raat, Kab. Maluku Tenggara	Pancing Ulur	Kerapu	Segar	Perairan Selat Rosenberg, Kab. Maluku Tenggara	Pangkalan Tual	Pembinaan
2		Longboat / Jukung	1	Usman Rahayaan	Desa Sitniohoi, Kab. Maluku Tenggara	Alat Tangkap Bubu	Kerapu,	Segar	Perairan Pulau Ubur, Kota Tual	Pangkalan Tual	Pembinaan
3	16 Januari 2024	Ilham Putra 02	3	Sarifuddin	Jl. Poros Poumako	Pancing Tonda	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika	Pembinaan
4	24 Januari 2024	Longboat / Jukung	1	Bapak Orpa Kbes	Jl. Sisir PDAM, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana	Pancing Ulur	Nihil	-	Perairan Namatota (03°50'964"-133°55'864"E)	Satwas SDKP Kaimana	Pembinaan
5	18 Januari 2024	Nurhalisa 02	5	Udin	Kelurahan Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kep. Tanimbar	Rawai Dasar	Ikan Hiu	Segar	WPP 718	Satwas SDKP MTB	Pembinaan
6	16 Januari 2024	Longboat / Jukung	1	Muhammad Hidayat	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wagom	Pancing Ulur	Ikan Baracuda	Segar	Perairan Fak-fak	Wilkert PSDKP Fak-fak	Pembinaan
7	12 Februari 2024	Duta Mario 02 (46.23.9327.5261.00002)	6	Baharuddin	Jl. Hiripau, Kab. Mimika	Gillnet	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika	Pembinaan
8	15 Februari 2024	Longboat / Jukung	1	Bapak Marten Salindeho	Jl. Kampung Arawala, Kab. Kaimana	Pancing Ulur	Nihil	-	Perairan Namatota (03°50'964"-133°55'864"E)	Satwas SDKP Kaimana	Pembinaan
9	20 Februari 2024	Longboat / Jukung	1	La Pilu	Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kep. Tanimbar	Pancing Ulur	Ikan dasar (Kerapu dan Kakap)	Segar	WPP 714	Satwas SDKP MTB	Pembinaan
10	15-Feb-24	Longboat / Jukung	1	Karama Rumain	Kelurahan Dulan PokPok Kecamatan Pariwari	Handline	Tenggiri	Segar	Perairan Fak-fak	Wilkert PSDKP Fak-fak	Pembinaan
11	1 Maret 2024	Longboat /Ketinting	1	Abdul Jabar Reniurwarin	Perairan Pulau Ubur, Kota Tual, Maluku					Pangkalan Tual	Diserahkan ke PPNS untuk di lakukan Penyidikan
12	14-Mar-24	KM. Yamaha	6	La Rolly	Jl. Utarum, Krooy, Kab. Kaimana	Gillnet, Rawai dasar, Pancing ulur	-	-	Perairan Namatota (03°49'34" S - 134°7'43" E)	Satwas SDKP Kaimana	Pembinaan
13	19 Maret 2024.	Longboat / Jukung	1	Hamidin	Jl. Teluk Izak, Kab. Fak-fak	Handline	Ikan dasar (Mubara, Kerapu, Kurisi)	Segar	Wagom Selatan di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak	Wilkert Fak-fak	Pembinaan

14	25-Mar-24	Longboat / Jukung	1	Yan Piter Unulula	Desa Oililit Kec. Tanimbar selatan, Kab. Kep. Tanimbar	Pancing Ulur	Ikan Dasar (Kerapu dan Kakap)	Segar	Perairan Kepulauan Tanimbar	Satwas SDKP MTB	Pembinaan
15	19 Maret 2024.	Longboat / Jukung	1	Hasan	Kampung Poumako Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah	Pancing Ulur	Udang, Rajungan, Lema, Baracuda, Bawal Hitam	Segar	Perairan Mimika (Lat - 4.889014° Long 136.751476°)	Satwas SDKP Mimika	Pembinaan
16	19-Apr-24	Longboat / Jukung	1	Hasan Matdoan	Jl. Kampung Arawala, Kab. Kaiamana Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah	Pancing Ulur	Tidak ada karena pengawasan dilakukan sebelum keberangkatan menuju <i>fishing ground</i>	-	Perairan Namatota (03°50'964"-133°55'864"E)	Satwas SDKP Kaimana	Pembinaan
17	19-Apr-24	Longboat / Jukung	1	Felix	Kampung Poumako Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah, Papua Tengah	Pancing Ulur	Kakap Kerong2 Kerapu Sembilang	Segar	WPP 718 Mimika	Satwas SDKP Mimika	Pembinaan
				Kasmerius	Kampung Poumako Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah, Papua Tengah	Pancing Ulur	Kakap Kerong2 Kerapu Sembilang				
				Agustinus	Kampung Poumako Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah, Papua Tengah	Pancing Ulur	Kakap Kerong2 Kerapu Sembilang				
18	23-Apr-24	Longboat / Jukung	1	La Baso	Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kep. Tanimbar	Pancing Ulur	Cakalang, Baby Tuna, Tenggiri	Segar	WPP 714	Satwas SDKP MTB	Pembinaan
19	19-Apr-24	Longboat / Jukung	1	La Nudi Boirayan	Wagom	Handline	kerapu, Kakap merah, kuwe, Barakkuda, Cakalang	Segar	Perairan Pulau Ega Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.	Wilker Fak-Fak	Pembinaan
20	22-Mei-24	Longboat / Jukung	1	Yanuaris Hikam	Jl. Kampung Arawala, Kab. Kaiamana	Rawai Dasar	Kakap Merah	Segar	Perairan Namatota (03°50'964"-133°55'864"E)	Satwas SDKP Kaimana	Pembinaan
21	13-Mei-24	Longboat / Jukung	1	Welem Mapabessi	Desa Namtabung Kec. Selaru, Kab. Kep. Tanimbar	Pancing Ulur	Kerapu	Segar	WPP714	Satwas SDKP MTB	Pembinaan

22	27-Mei-24	Longboat / Jukung	1	Bahrudin	Kampung Poumako Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah	Trammet Net	Lema	Segar	WPP 718 Mimika	Satwas SDKP Mimika	Pembinaan
23	10-Mei-24	Longboat / Jukung	1	Rumbaret	Perairan Pulau Panjang Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.	Handline	Nihil	-	Perairan pulau panjang, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat	Wilker Fak-Fak	Pembinaan
24	19-Jun-24	Longboat / Jukung	1	Bapak Yason	Jl. Kampung Arawala, Kab. Kaiamana	Rawai Dasar	Kakap dan Kerapu	Segar	Perairan Namatota (03°50'964"-133°55'864"E)	Satwas SDKP Kaimana	Pembinaan
25	12-Jun-24	Longboat / Jukung	1	La Dante	Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kep. Tanimbar	Pancing Ulur	Cakalang dan Baby Tuna	Segar	WPP 714	Satwas SDKP MTB	Pembinaan
26	13-Jun-24	Longboat / Jukung	1	Safaruddin	Kampung Poumako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah	Gill Net	Bawal Hiam	Segar	WPP 718 Mimika	Satwas SDKP Mimika	Pembinaan
27				Hasanuddin							
28				Muzakir		Pancing Ulur					
29	18-Jun-24	Longboat / Jukung	1	Tomas	Pulau Ubur, Kota Tual	Handline	Kerapu	Segar	Perairan Pulau Ubur, Kota Tual	Pangkalan Tual	Pembinaan
30				Abdul Fidmatan	Mangon, Kota Tual						

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan menurunkan 1 IKU yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan sejak tahun 2023. IKU ini merupakan penjabaran atas tugas pengawasan dan satu-satunya indikator kinerja pada bidang pengawasan sumber daya perikanan.

a. IKU 6: Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)

IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Pangkalan PSDKP Tual dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- Xsdp* : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- Xi* : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
- n* : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Tabel 23 Pemeriksaan IKU 6

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan

2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Pelaksanaan pengawasan terhadap IKU ini terbagi atas 4 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan.

IKU ini dapat dicapai Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Berikut tabel capaian indikator kinerja 6.

Tabel 24 Capaian IK 6

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I 2024	TW II 2024	s/d TW II	TW II 2023
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	100	100	100	100	100	100

Berikut kami sajikan tabel rekapitulasi total pengawasan sumber daya perikanan.

Tabel 25 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan

No	Subsektor	Capaian s.d. TW II
1	Penangkapan	32
2	Budidaya	15
3	Pengolahan	12
4	Distribusi dan Pemasaran	16
5	LKR (Distribusi Non OSS)	12
Total		87

$$\text{Capaian IKU 6} = \frac{3.200+1.500+1.200+1.600+1.200}{87} = \frac{8.700}{87} = 100$$

$$\text{Capaian IKU 6} = \frac{tw I+tw II}{2} = \frac{100+100}{2} = \frac{200}{2} = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

1. Melengkapi Pengawas Perikanan dengan sarana dan pengawasan yang memadai dalam menjalankan tugas sehingga tugas menjadi optimal, semisal penggunaan *vernier caliper* (jangka sorong), meteran, alat transportasi, kamera bawah air, dll;
2. Membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;
3. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
4. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
5. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
6. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;

- Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat diantaranya:

- Masih terdapat kendala dalam pelayanan secara online;
- Masih banyak *stakeholder* yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi online dalam pelayanan.

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

- Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
- Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap 87 lembaga. Pengawasan sumber daya perikanan yang kegiatannya mendukung pencapaian IKU ini turut menyumbang realisasi sebesar 14,79% atau sebesar 243,294,629,- dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp1,645,000,000,-.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan

Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan dalam kurun waktu sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah melaksanakan pemeriksaan kepada 32 pelaku usaha, yang terbagi di Pangkalan PSDKP Tual maupun di satwas. Salah satu kendala dalam pemeriksaan ini adalah banyaknya kapal perikanan yang melakukan penangkapan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual namun tidak berkantor pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Selain melakukan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko, Pangkalan PSDKP Tual melakukan pelayanan terhadap penerbitan SLO. Selama kurun waktu Triwulan II Pangkalan PSDKP tual telah menerbitkan 4.307 SLO dengan rincian sebagai berikut

Tabel 26 Rekapitulasi penerbitan SLO Triwulan II

No	Lokasi (UPT/Satuan/Wilker PSDKP)	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO			
		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	PANGKALAN PSDKP TUAL	96	111	109	38	17	17	-	-	-	134	128	126	98,44	126	2
2	WILKER PSDKP DOBO	476	651	613	306	334	259	-	2	2	782	987	874	88,55	874	113
3	WILKER PSDKP WARABAL	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	100,00	1	-
4	SATUAN PSDKP SORONG	88	86	86	1.604	1.622	1.622	332	345	345	2.024	2.053	2.053	100,00	2.053	-
5	WILKER PSDKP SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WILKER PSDKP RAJAAMPAT	17	16	16	-	-	-	-	-	-	17	16	16	100,00	16	-
7	SATUAN PSDKP MERAUKE	113	226	224	358	424	418	-	-	-	471	650	642	98,77	642	8
8	WILKER PSDKP ASMAT	3	3	3	-	-	-	2	2	2	5	5	5	100,00	5	-
9	WILKER PSDKP WANAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SATUAN PSDKP KAIMANA	25	29	29	231	216	216	-	-	-	256	245	245	100,00	245	-
11	WILKER PSDKP FAKFAK	-	-	-	92	80	80	-	-	-	92	80	80	100,00	80	-
12	WILKER PSDKP WIMRO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	SATUAN PSDKP MIMIKA	156	178	178	26	38	36	-	-	-	182	216	214	99,07	214	2
14	SATUAN PSDKP MTB	9	9	9	39	40	40	1	1	1	49	50	50	100,00	50	-
15	WILKER PSDKP KISAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WILKER PSDKP BENJINA	5	1	1	-	-	-	-	-	-	5	1	1	100,00	-	-
	JUMLAH	989	1.310	1.268	2.695	2.772	2.689	335	350	350	4.019	4.432	4.307	97,18	4.306	125

Tabel 27 Pengawasan penangkapan kapal perikanan

No	Nama	Kode Proyek	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Status	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi (BAP)
1	Hengky Tjong	202212-1017-5937-0679-238	Insidental	Beroperasi	Nilai kepatuhan teknis KBLI 03111 sebesar 85% (baik sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	Paryanto	202205-1915-2207-8786-899	Insidental	Beroperasi	Nilai kepatuhan teknis KBLI 03111 milik Paryanto sebesar 85% (baik sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	PT. Industri Perikanan Namatota	-	Insidental	Beroperasi	Nilai Kepatuhan Pelaku Usaha Pada KBLI 03111 Standar Usaha Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut Sebesar 61,6%	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	PT. DWI BINA UTAMA	202111-1110-0834-0336-373	Insidental	Beroperasi	1. Nilai kepatuhan teknis diberi bobot penilaian 93 %, 2. Belum semua awak kapal memiliki sertifikat teknis	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pembinaan dan Perbaikan
5	ZETLY R. KAWENGIAN	202206-2008-5713-7541-660	Insidental	Beroperasi	1. Penilaian pemeriksaan teknis pada kbli 03111 terhadap pelaku usaha zetly r kawengian diberi bobot penilaian 98 % (baik sekali), 2. Laporan Kegiatan Usaha belum dilaporkan karena kapal belum beroperasi sejak oktober 2022, 3. Belum semua awak kapal memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pembinaan dan Perbaikan
6	ARSADY	-	Insidental	Beroperasi	Nilai kepatuhan teknis sebesar 76.5% artinya Baik Sekali, adapun yang belum terpenuhi adalah pengisian Log Book, Dokumen PKL dan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal Perikanan.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
7	MIRWAN	-	Insidental	Beroperasi	--	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
8	Husein	201912-1623-5440-0034-003	Insidental	Beroperasi	Nilai kepatuhan teknis sebesar 76.5% artinya Baik Sekali, adapun yang belum terpenuhi adalah pengisian Log Book, Dokumen PKL dan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal Perikanan.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
9	AWALUDDIN	-	OSS	Beroperasi	- Nahkoda telah memiliki Ankapin TK III dan Buku Pelaut, sedangkan KMM masih menggunakan SKK 60 Mill dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. - Pada NIB terdapat satu KLBI 03111 (Penangkap Pisces/ikan bersirip di laut dan dokumen kapal lainnya - Pemilik Kapal telah menggunakan perjanjian kerja laut (PKL) bagi awak kapal perikanan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
10	ARIFIYANTO	202301-3013-2916-2824-472	OSS	Beroperasi	-	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
11	CV ENAM BERSAUDARA MANOHA	202112-2115-3159-2271-616	OSS	Beroperasi	Nilai kepatuhan teknis sebesar 15% artinya Kurang Baik, adapun yang belum terpenuhi adalah persyaratan umum, persyaratan khusus, kesesuaian struktur Organisasi dan SDM, dan persyaratan proses dalam kegiatan usaha penangkapan ikan pisces.	Pembinaan dan Perbaikan
12	PT HANSEN MINA JAYA	202205-1815- 2420 3118-669	OSS	Tidak beroperasi	Kegiatan usaha penangkapan crustacea di laut tidak ditemukan di lokasi usaha, kondisi gedung dalam kondisi kosong, tidak ada armada kapal penangkap Ikan, sehingga perusahaan belum memenuhi	Penerapan sanksi

					standar usaha penangkapan crustacea di laut. Nilai kepatuhan teknis KBLI 03112 PT. HANSEN MINA JAYA sebesar 0 % dengan kategori kurang baik.	
13	PT HANSEN MINA JAYA	202205-2011-2407-2333-618	OSS	Tidak beroperasi	Kegiatan usaha penangkapan mollusca di laut tidak ditemukan di lokasi usaha, kondisi gedung dalam kondisi kosong, tidak ada armada kapal penangkap Ikan, sehingga perusahaan belum memenuhi standar usaha penangkapan Mollusca di laut. Nilai kepatuhan teknis KBLI 03113 PT. HANSEN MINA JAYA sebesar 0 % dengan kategori kurang baik.	Penerapan sanksi
14	PT HANSEN MINA JAYA	202205-1811-5151 0098-426	OSS	Tidak beroperasi	Kegiatan usaha penangkapan pisces/ikan bersirip di laut tidak ditemukan di lokasi usaha, kondisi gedung dalam kondisi kosong, tidak ada armada kapal penangkap Ikan, sehingga perusahaan belum memenuhi standar usaha penangkapan pisces/ikan bersirip di laut. Nilai kepatuhan teknis KBLI 03111 PT. HANSEN MINA JAYA sebesar 0 % dengan kategori kurang baik.	Penerapan sanksi
15	GUNAWAN	202312-0410-0238-9783-752	OSS	Beroperasi	Nilai kepatuhan dari KBLI 03111 (Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut) sebesar 80% artinya bahwa kepatuhan teknis usaha penangkapan ikan pelaku usaha GUNAWAN dinyatakan baik sekali	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
16	PT. PERIKANAN INDONESIA	202112-2311-5318-2387-267	OSS	Tidak Beroperasi	1. TIDAK DITEMUKAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN UNTUK KODE PROYEK 202112-2311-5318-2387-267 DENGAN KBLI 03111 - PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DILAUT DENGAN LOKASI PROYEK PAPUA BARAT DI PT. PERIKANAN NDONESIA CAB SORONG; 2. PT. PERINDO CABANG SORONG BELUM MEMILIKI SARANA BERUPA KAPAL PENANGKAP IKAN KARENA MASIH DALAM TAHAP PERENCANAAN KEDEPAN; 3. PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS PELAKU USAHA DIBERI BOBOT PENILAIAN 0 %	Pembinaan dan Perbaikan
17	EDY LIE	202310-1307-2854-2612-564	OSS	Beroperasi	-	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
18	EDY LIE	202310-1116-3336-2417-328	OSS	Beroperasi	-	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
19	EDY LIE	202310-1116-3452-9309-247	OSS	Beroperasi	-	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
20	Awaluddin	-	Insidental	Beroperasi	- Nahkoda telah memiliki Sertifikat Ankapin Tingkat III dan Buku Pelaut - KKM belum memiliki sertifikat Atkapin Tingkat III masih menggunakan SKK 60 Mill yang di keluar oleh KUPP Kelas III Juwana dan Buku Pelaut - Awaluddin selaku pelaku usaha sekaligus pemilik memiliki dua unit armada kapal penangkap ikan yaitu 1.Km. Berkah Mina Saudara GT. 187 dan 2.Km. Buntar Rejeki GT 90 - Telah memenuhi persyaratan teknis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di bidang perikanan tangkap - Pemilik kapal telah menggunakan perjanjian kerja laut (PKL) bagi awak kapal perikanan - Kepatuhan teknis 90 % (Baik Sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
21	PT Insani Gemilang Pualam	20231-2151-4133-7803-4821	Insidental	Beroperasi	untuk SDM belum seluruh ABK memiliki sertifikat Basic Safety Training (BST) Fisheries dan sertifikat ketrampilan lainnya	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

22	PT Insani Gemilang Pualam	20231-2151-4163-5800-3549	Insidental	Beroperasi	SDM: Belum seluruh ABK memiliki sertifikat BST Fisheries dan sertifikat ketrampilan lainnya	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
23	PT Insani Gemilang Pualam	20231-2151-4080-7313-7777	Insidental	Beroperasi	SDM: Belum seluruh ABK memiliki sertifikat Basic Safety Training (BST) Fisheries dan sertifikat keterampilan lainnya	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
24	PT Insani Gemilang Pualam	20231-2151-4035-7074-4617	Insidental	Beroperasi	SDM: Belum seluruh ABK memiliki sertifikat Basic Safety Training (BST) Fisheries dan sertifikat keterampilan lainnya	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
25	PT Insani Gemilang Pualam	20231-2151-3583-9651-4291	Insidental	Beroperasi	SDM: Belum seluruh ABK memiliki sertifikat Basic Safety Training (BST) Fisheries dan sertifikat keterampilan lainnya	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
26	PT Insani Gemilang Pualam	20231-2151-3424-9480-8458	Insidental	Beroperasi	SDM: Belum seluruh ABK memiliki sertifikat Basic Safety Training (BST) Fisheries dan sertifikat keterampilan lainnya	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
27	NIKOLAS BUDI PUTRA PRATAMA	202312-0920-1233-7151-658	Insidental	Beroperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah di laksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Milik : Nikolas Budi Putra Pratama dengan nilai kepatuhan teknis sebesar 90 % artinya (Baik Sekali) 2. Pada NIB terdapat KLBI 03111 Penangkapan Ikan Pisces/Ikan Bersirip dilaut. 3. Nahkoda dan KKM telah memiliki Masing sertifikat di antaranya ANKAPIN Tingkat III untuk Nahkoda dan ATKAPIN Tingkat III untuk KKM yang di keluarkan oleh DITJEN Hubla Kemenhub. 4. Sedangkan Abk belum memiliki sertifikat keahlian sesuai kompetensi masing – masing. 5. Pemilik Kapal /Operator telah menggunakan perjanjian laut bagi awak Abk Kapal perikanan yang di tanda tangani oleh syahbandar. 	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
28	Riyan Ronald Afaratu	202204-2909-1919-9003-564	Insidental	Beroperasi	Nilai kepatuhan teknis sebesar 74% artinya Baik Sekali, adapun yang belum terpenuhi adalah persyaratan khusus, kesesuaian struktur Organisasi dan SDM, dan persyaratan proses dalam kegiatan usaha penangkapan ikan pisces.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
29	Robani Hendra Permana	202404-2614-3936-9235-463	Insidental	Beroperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah di laksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Milik :Robani Hendra Permana dengan nilai kepatuhan teknis sebesar 90 artinya (Baik Sekali) 2. Pada NIB terdapat KLBI 03111 Penangkapan Ikan Pisces/Ikan Bersirip dilaut. 3. Nahkoda dan KKM Belum memiliki sertifikat ANKAPIN Tingkat III untuk Nahkoda dan ATKAPIN Tingkat III untuk KKM tetapi masih menggunakan SKK 60 Mill untuk melakuka kegiatan penangkapan ikan. 4. Sedangkan Abk belum memiliki sertifikat keahlian sesuai kompetensi masing – masing. 	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

					5. Pemilik Kapal /Operator telah menggunakan perjanjian laut bagi awak Abk Kapal perikanan yang di tanda tangani oleh syahbandar.	
30	Michael Albert Harjono	202305-0615-1236-7431-762	Insidental	Beroperasi	Nilai kepatuhan teknis sebesar 20% artinya Kurang, adapun yang belum terpenuhi adalah persyaratan umum, persyaratan khusus, kesesuaian struktur Organisasi dan SDM, dan persyaratan proses dalam kegiatan usaha penangkapan ikan pisces.	Penerapan sanksi
31	Nikolas Budi Putra Pratama	202312-0920-1223-7151-658	Insidental	Beroperasi	1. Telah di laksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Milik :Robani Nikolas Budi Putra Pratama dengan nilai kepatuhan teknis sebesar 90 artinya (Baik Sekali) 2. Pada NIB terdapat KLBI 03111 Penangkapan Ikan Pisces/Ikan Bersirip dilaut. 3. Nahkoda dan KKM Telah memiliki sertifikat ANKAPIN Tingkat III untuk Nahkoda dan ATKAPIN Tingkat III untuk KKM melakukan kegiatan penangkapan ikan. 4. Sedangkan Abk belum memiliki sertifikat keahlian sesuai kompetensi masing – masing. 5. Pemilik Kapal /Operator telah menggunakan perjanjian laut bagi awak Abk Kapal perikanan yang di tanda tangani oleh syahbandar.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
32	Umar	202310-2121-0459-2191-731	Insidental	Beroperasi	1. Telah di laksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Milik :Umar dengan nilai kepatuhan teknis sebesar 90 artinya (Baik Sekali) 2. Pada NIB terdapat KLBI 03111 Penangkapan Ikan Pisces/Ikan Bersirip dilaut. 3. Nahkoda dan KKM Telah memiliki sertifikat ANKAPIN Tingkat III untuk Nahkoda dan ATKAPIN Tingkat III dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. 4. Sedangkan Abk belum memiliki sertifikat keahlian sesuai kompetensi masing – masing. 5. Pemilik Kapal /Operator telah menggunakan perjanjian laut bagi awak Abk Kapal perikanan yang di tanda tangani oleh syahbandar.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha



Gambar 5 Pengawasan perizinan berusaha sektor penangkapan ikan

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan

Pengawasan terhadap UPI yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 kepada 12 unit usaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidentil. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 28 Rekap Pengawasan Pengolahan

No	Nama	Kode Proyek	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Status	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi (BAP)
1	PT DWI BINA UTAMA	201912-3009-3201-5845-583	OSS	Beroperasi	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha telah memenuhi Kriteria Pemeriksaan Teknis sehingga diberi bobot penilaian 90.5 % (Baik Sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	PT DWI BINA UTAMA	201912-3009-3201-6542-348	OSS	Belum Beroperasi	Belum dilaksanakan kegiatan usaha KBLI 10213 yang tercantum dalam NIB	Pembinaan dan Perbaikan
3	PT OVER SEAS SEAFOOD	202203-2808-4740-8451-386	OSS	Belum Beroperasi	Belum ada aktivitas kegiatan perikanan (sarana dan prasarana belum tersedia) nilai kepatuhan teknis pelaku usaha KBLI 03133 sebesar 0%	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	CV.Mutiara Timur Laut	202202-2208-4132-6675-630	OSS	Beroperasi	- Hasil Pemeriksaan diperoleh nilai teknis 90 % artinya Baik Sekali -Adapun Kriteria yang belum di penuhi pelaku usaha yaitu membuat laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulan sekali	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

5	CV.Mutiara Laut Timur	202202-2208-5151-2000-000	OSS	Beroperasi	- Hasil Pemeriksaan di peroleh nilai teknis sebesar 80 % - Adapun Kriteria yang belum dipenuhi pelaku usaha belum memiliki sertifikat penerapan PMMT/HACCP dalam menjalankan usahanya.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
6	PT. Samudera Indo Sejahtera	201912-3015-2441-1502-131	OSS	Beroperasi	Belum membuat laporan kegiatan usaha (LKU) sesuai dengan standar format yang sudah di tentukan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
7	UD.Arafura	202202-2306-4500-4396-744	OSS	Beroperasi	- Telah melakukan pemeriksaan Nilai Kepatuhan teknis 90 % (Baik Sekali) - Telah memenuhi Persyaratan teknis sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Penerapan Menejemen Mutu Terpadu (PMMT)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
8	CV. MITRA LEO GROUP	202107-1314-0055- 9572-611	OSS	Beroperasi	Penilaian teknis KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan) pada CV. Mitra Leo Group sebesar 85,2 %. CV. Mitra Leo Group belum membuat LKU setiap 6 bulan, memiliki sarana Cold Storage dengan kapasitas 40 ton, ABF (Air Blast Freezer) sebanyak 1 unit kapasitas 3 ton. Jenis ikan yang diolah ikan Tenggiri, Ikan Kerapu dengan produk akhir Ikan Beku (Frozen Fish) dan Telur Ikan Terbang Beku. CV. Mitra Leo Group telah memiliki perizinana berusaha dan dilengkapi SKP.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
9	PT. Marin Gratia Indonesia	-	OSS	Beroperasi	Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan KBLI 10213 (industri pembekuan ikan) diperoleh nilai = 77,5 (Baik)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pembinaan dan Perbaikan
10	PT BINTANG FAHRI INTERNASIONAL	-	OSS	Beroperasi	- Memiliki 2SKP yang terdiri dari SKP Sirip Hiu Kering dan SKP Gelembung Ikan Kering	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
11	PT PERIKANAN INDONESIA	-	OSS	Beroperasi	SARANA PRASANA MEMADAI	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
12	CV LUCKY SURYA TIMUR	202203-1010-0859-6094-931	OSS	Beroperasi	Dari hasil analisa pengawasan kami pada CV.Lucky Surya Timur telah memenuhi persyaratan umum,khusus,sarana,SDM dalam menjalankan usahanya,namun masih perlu diperbaiki sistem informasi terhadap pelayanan konsumen/atau media informasi terhadap pengaduan konsumen.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha



Gambar 6 Pengawasan perizinan berusaha sektor pengolahan ikan

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan

Pengawasan terhadap distribusi dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 kepada 16 Pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual berikut gambar dan tabelnya.



Gambar 7 Pengawasan pendistribusian ikan

Tabel 29 Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran

No	Nama Perusahaan	Kode Proyek	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Status	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi (BAP)
1	UD. Cahaya A	-	Insidental	Beroperasi	CPIB YANG DIKELUARKAN BADAN KARANTINA SUDAH TIDAK BERLAKU	Pembinaan dan Perbaikan
2	PT. Industri Perikanan Namatota	202203-2110-4844-8097-715	Insidental	Beroperasi	Nilai Kepatuhan Pelaku Usaha Pada KBLI 50133 Standar Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus Sebesar 78,6% (baik sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	PT Sonok Lestari Mas	-	Insidental	Beroperasi	penilaian teknis KBLI 50133 KM. Harapan Indah III sebesar 91%, belum mempunyai Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	CV. SEAFOOD SEJAHTERA PAPUA	202102-2709-5437-2181-364	OSS	Beroperasi	Perlu peningkatan SDM, dan serta melengkapi dokumen yang masih belum lengkap.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
5	PT. Agung Gatra Permai	202007-0711-1829-4125-385	Insidental	Beroperasi	persyaratan khusus usaha PT Agung Gatra Permai belum memenuhi Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan belum membuat LKU, SDM belum memiliki sertifikat untuk jaminan mutu dan keamanan pangan, belum ada ruangan khusus untuk pengolahan dan packing secara terpisah dan terhindar dari kontaminasi luar, belum memiliki IPAL	Pembinaan dan Perbaikan
6	Yudi Firdian	202403-0615-4222-8839-114	Insidental	Beroperasi	Nilai Kepatuhan teknis dari kegiatan Perdagangan Eceran Hasil Perikanan adalah 100% artinya Baik Sekali. Hal ini karena semua kriteria dapat terpenuhi.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
7	CV.Mutiara Laut Timur	202110-0108-2315-8108-878	Insidental	Beroperasi	- Hasil Pemeriksaan diperoleh nilai kepatuhan teknis 83,5 % (Baik Sekali) - Adapun Hasil yang dapat dipenuhi Pelaku Usaha adalah persyaratan khusus yaitu Sarana display penyajian, Perencanaan dan Komunikasi dengan pelanggan terkait pelayanan.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
8	PT Duta Maluku Perkasa	202404-2021-5004-9835-998	Insidental	Beroperasi	Nilai Kepatuhan teknis dari kegiatan Perdagangan Eceran Hasil Perikanan adalah 100% artinya Baik Sekali. Hal ini karena semua kriteria dapat terpenuhi	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
9	RICHARD CHANDRA	202210-1308-2910-0478-357	Insidental	Beroperasi	- Hasil Pemeriksaan di Peroleh Nilai Kepatuhan Teknis Sebesar 80 % (Baik Sekali) - Belum memiliki sarana display atau penyajian, Kontak Layanan/Konsumen Media Sosial	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
10	CV. BOBBY ARAFURA FISHING INDUSTRIES	201912-3019-3108-6182-430	Insidental	Beroperasi	Penilaian teknis KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) pada CV. Bobby Arafura Fishing Industries sebesar 88,33 %.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
11	Rusdiati	-	Insidental	Beroperasi	Unit Pengolahan Ikan milik Ibu Rusdiati telah memiliki NIB tetapi belum memiliki SKP	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
12	CV.NIAGA INDONESIA	202111-0119-5410- 0744-496	Insidental	Beroperasi	Belum memenuhi persyaratan khusus usaha berupa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), belum membuat Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 bulan sekali, belum memiliki dokumen SHTI dan HACCP terkait produk ikan beku yang dipasarkan. - Penilaian teknis KBLI 46206 (Perdagangan besar hasil perikanan) pada CV.Niaga Indonesia sebesar 31% - Belum memiliki SKP dan melakukan kegiatan usaha	Penerapan sanksi
13	CV I Three Bintang Samudra	202307-2415-2402-3583-615	Insidental	Beroperasi	telah memenuhi kelayakan teknis dengan nilai 100% karena merupakan usaha skala mikro	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

14	UD PIALA	202301-2512-5522-2759-760	Insidental	Beroperasi	UD Piala sudah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait perdagangan dan sudah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan di bidang perikanan dan kelautan.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
15	UD PIALA	202301-2512-5917-4752-696	Insidental	Beroperasi	UD Piala sudah melakukan kegiatan produksi dan Pemasaran Hasil Olahan Perikanan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
16	Usman Surulla (CV.Dandi Putra)	202309-2609-3835-2737-423	Insidental	Beroperasi	Hasil Pemeriksaan di Peroleh Nilai Kepatuhan Teknis Sebesar 82,5 % (Baik Sekali) Belum memiliki sarana display atau penyajian,Kontak Layanan/Konsumen Media Sosial	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan kepada 15 pelaku usaha. Berikut data kami disajikan dalam tabel:

Tabel 30 Rekap pengawasan budidaya

No	Nama	Kode Proyek	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Status	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi (BAP)
1	PT. Globalindo Mutiara	201912-3223-4733-6556-860	Insidental	Beroperasi	Nilai kepatuhan teknis KBLI 03212 (Pembenihan Ikan Laut) nilai kelayakan teknis sebesar 92% (Baik Sekali)	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	JOHAN GUNAWAN	-	Insidental	Beroperasi	KEGIATAN USAHA MASIH TERMASUK USAHA KECIL, MASIH BANYAK KEKURANGAN DALAM PEMENUHAN SEPERTI SARANA DAN PRASARANA, DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM SERTA MANAJEMEN USAHA YANG LEBIH BAIK LAGI.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	REMI OKTAVIANUS	-	Insidental	Beroperasi	KEGIATAN USAHA MASIH TERMASUK USAHA KECIL, MASIH BANYAK KEKURANGAN DALAM PEMENUHAN SARANA PENDUKUNG, PENINGKATAN KUALITAS SDM SERTA MANAJEMEN USAHA YANG LEBIH BAIK LAGI	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	PT Cendana Indopearls	-	Insidental	Beroperasi	penilaian teknis KBLI 03215 PT. Cendana Indopearls 95 %, PKKPR sudah tahap I verifikasi teknis	Pembinaan dan Perbaikan
5	PT. DAFIN MUTIARA	202101-1114-5454-8918-654	Insidental	Beroperasi	Penilaian teknis KBLI 03212 pembenihan ikan laut PT. Dafin Mutiara - Ohoitahit sebesar 71,5 (Baik Sekali), belum bisa menunjukkan laporan kegiatan usaha (LKU) setiap 6 bulan sekali, telah memiliki sertifikat CBIB.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
6	PT. RAJAWALI LAUT TIMUR	-	Insidental	Beroperasi	KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN TELAH MEMILIKI DOKUMEN PERIZINAN BERUPA NIB DAN PKKPR, KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN MENGGUNAKAN SISTEM KERAMBA JARING APUNG YANG BERJUMLAH 10 PETAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENAMPUNG IKAN KERAPU HIDUP.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

7	GODLIF SELMURY	202206-0133-3148-6789-986	Insidental	Beroperasi	Sudah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang ada, perlu perbaikan berupa penambahan SDM di bidang manajemen perkantoran dan penerapan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan	Pembinaan dan Perbaikan
8	CV. DIANA INDAH DEWATA	202304-1113-3006-0458-333	Insidental	Beroperasi	BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN DIPEROLEH DATA SEBAGAI BERIKUT : - PELAKU USAHA TELAH MEMILIKI NIB DENGAN KBLI 03211, - KEGIATAN USAHA MEMILIKI KERAMBA JARING APUNG DENGAN JUMLAH 8 PETAK DAN 1 PETAK RUMAH JAGA, - JUMLAH TENAGA KERJA 2 ORANG WNI, - KEGIATAN USAHA MENAMPUNG IKAN KERAPU HIDUP YANG DIBELI DARI NELAYAN LOKAL, - PEMBERIAN PAKAN IKAN DILAKUKAN SETIAP HARI SEBANYAK 10 S/D 30 KG IKAN RUCAH (IKAN SAKUDA, IKAN KAPAS, DSB) TERGANTUNG JUMLAH IKAN DI DALAM KJA, - OBAT IKAN YANG DIGUNAKAN YAITU AQUADES, PANTO VITAMIN, AMOXICILIN, DAN GENTACIMIN, - IKAN YANG SUDAH MEMENUHI TARGET AKAN DIANGKUT MENGGUNAKAN KAPAL ANGKUT IKAN HIDUP MENUJU BENOA	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
9	PT. Rajawali Laut Timur	202111-1111-439-3001-525	Insidental	Beroperasi	- Kegiatan usaha telah memenuhi pesyaratan umum dan khusus usaha dengan dilengkapi SIUP, NIB dan Dokumen PKKPRL, - Sarana yang dimiliki yaitu Keramba Jaring Apung dengan jumlah 11 Petak dan 1 Petak Rumah Jaga, - Keramba Jaring Apung digunakan untuk menampung ikan kerapu hidup yang dibeli dari nelayan lokal, - Jenis ikan kerapu yang ditampung yaitu kerapu macan, sunu, tongsing, karang, dll, - Tenaga Kerja berjumlah 3 Orang Laki-Laki, - Pemberian pakan dilakukan setiap hari yaitu ikan rucah (sakuda, kapas-kapas,dll) sebanyak 10-30 Kg tergantung jumlah ikan dalam KJA, - Obat ikan yang digunakan yaitu Gentamicin, Amoxicilin, Sodium Chloride, Panto Vitamin dan Aquades, -Ikan kerapu yang sudah memenuhi jumlah target akan diangkut menggunakan kapal pengangkut milik PT. Rajawali Laut Timur menuju Kota Ambon, Provinsi Maluku.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
10	PT Rajawali Laut Timur	202109-1017-5311-2769-322	Insidental	Beroperasi	sarana: belum ada wadah khusus untuk tempat obat ikan yang digunakan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
11	Cv. Putra Raja Bahari	-	Insidental	Beroperasi	1. Cv. Putra Raja Bahari telah memiliki perizinan berusaha 2. Sudah menerapkan prinsip - prinsip cara budidaya ikan yang baik 3. Sudah memiliki sarana pembudidayaan yang cukup	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
12	PT. Kabui Mutiara Sejahtera	202306-1316-2814-5776-990	Insidental	Beroperasi	1. Tingkat Kepatuhan teknis PT. Kabui Mutiara Sejahtera untuk KBLI 03212 (Pembenihan Ikan Laut) adalah Sebesar 90% yang artinya baik sekali. 2. PT. Kabui Mutiara Sejahtera belum memiliki KBLI pembesaran molusca laut karena belum memiliki PKKPRL	Pembinaan dan Perbaikan, Penerapan sanksi
13	SUWANTO	-	Insidental	Beroperasi	1. Kegiatan usaha yang sudah dijalankan berupa pembenihan ikan milik bapak Suwanto belum memiliki perizinan berusaha berbasis risiko, 2. Tidak menggunakan obat, pakan dan bahan kimia yang membahayakan dan telah terdaftar di KKP, 3. Telah menerapkan cara pembenihan ikan yang baik, 4. Kepatuhan teknis pelaku usaha diberi bobot penilaian 65 % (baik).	Pembinaan dan Perbaikan

14	NURFATIN	202110-0414-0334-02949-788	Insidental	Beroperasi	1. Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, 2. Menggunakan pakan, Obat dan bahan kimia yang terdaftar di KKP, 3. Benih lele berasal dari hasil pemijahan sendiri dan benih Nila hitam berasal dari pasuruan Jawa timur (usaha perorangan skala mikro).	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pembinaan dan Perbaikan
15	CV ENAM BERSAUDARA MANOHA	202112-2116-2503-1291-137	Insidental	Belum beroperasi	Tidak ditemukan kegiatan pembudidayaan	Penonaktifan KBLI dan sudah dihapus



Gambar 8 Pengawasan budidaya

a.5 Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi lobster kepiting rajungan.

Pengawasan distribusi lobster, kepiting, dan rajungan yang dilakukan Pangkalan PSDKP Tual selama kurun waktu hingga Triwulan II tahun 2024 adalah sebanyak 12 pelaku usaha, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 31 Rekapitulasi pengawasan LKR

No	Nama	Kode Proyek	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Status	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)	Rekomendasi (BAP)
1	ABIYU MARINE PRODUCT	-	LKR	Beroperasi	sudah sesuai ketentuan perUndang-undangan yang berlaku	Telah memenuhi syarat
2	ANDI UDIN	-	LKR	Beroperasi	Sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Telah memenuhi syarat
3	CECEP SIHABUDIN	-	LKR	Beroperasi	Sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Telah memenuhi syarat
4	CV SAMUDRA KERIS JAYA	-	LKR	Beroperasi	distribusi kepiting telah sesuai, dengan peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan	Telah memenuhi syarat
5	EDI SUGIYANTO	-	LKR	Beroperasi	Sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Telah memenuhi syarat
6	HARDIANSYAH GELAMONA	-	LKR	Beroperasi	Telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 5 ekor Lobster hidup dari 92 ekor Lobster hidup yang akan didistribusikan menuju Jakarta Barat maka dinyatakan bahwa Distribusi Lobster hidup telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perikanan	Telah memenuhi syarat
7	HARYANTO SIRUA	-	LKR	Beroperasi	Sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Telah memenuhi syarat
8	JUSTIANO FATRIAROSSA VENNEDY	-	LKR	Beroperasi	Sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Telah memenuhi syarat
9	MUSAIDIN	-	LKR	Beroperasi	rajungan yang diolah menjadi daging rajungan ukuran lebar karapas dan berat = 12 cm/90 gram, ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dalam kondisi bertelur.	Telah memenuhi syarat
10	MUSDALIFAH	-	LKR	Beroperasi	Sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan	Telah memenuhi syarat
11	RAHMAT	-	LKR	Beroperasi	sudah sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan	Telah memenuhi syarat
12	REMI OCTAVIANUS	-	LKR	Beroperasi	telah di laksanakan pengawasan lobster sesuai perundang-undangan yang berlaku	Telah memenuhi syarat



Gambar 9 Pengawasan distribusi LKR

5. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);

a. IKU 9: Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan penerapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Pangkalan PSDKP Tual untuk;

1. penerapan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. penerapan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan

pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Tabel 32 kriteria indeks sanksi adm

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	60	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 100 atas IK ini. Pangkalan PSDKP Tual menyelesaikan 3 kasus pengenaan sanksi administrasi berdasarkan hasil ekspose, dengan denda administratif sebesar Rp555.600.000,-. Dua kapal diantaranya merupakan kapal yang di adhoc oleh kapal pengawas dan satu lainnya adalah hasil pemeriksaan pengawas perikanan. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 33 Capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I 2024	TW II 2024	s/d TW II	TW I 2023
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	60	80	80	80	80	100

$$\text{Capaian IKU 9} = \left(\frac{3}{3}\right) \times 100\% = 100\% \text{ (80 mengacu kriterian indeks) (baik)}$$

$$\text{Capaian IKU 9} = \frac{tw I + tw II}{2} = \frac{80 + 80}{2} = \frac{160}{2} = 80$$

Tabel 34 Rekap penerapan sanksi administratif berdasarkan ekspose

No.	Nama Kapal (GT)	Jenis Kapal	Alat Tangkap	Pelaku Usaha/ Perorangan			Pemeriksa		Pelanggaran	Proses Penanganan						
				Nama	Peran	Nahkoda	Unit Kerja yang Menangani	Kapal		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Nomor Surat Penetapan	Tanggal Surat Penetapan	Tanggal Surat Berakhirnya	Tanggal Penyetoran	Jumlah Denda (Rp)
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	25
1	KM. SENTOSA MAKMUR (GT. 30)	PENANGKAP	Pancing Ulur Tuna	INDO MINA GRASIA, PT	Pemilik	YODIUS ALI	Pangkalan PSDKP Tual	KP. HIU 14	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, yaitu pelanggaran DPI	Denda Administratif	B.186/DJPSDKP /PW.110/III/20 24	25 Maret 2024	26 Maret 2024	26 Maret 2024	39.600.000	Selesai
2	KM. MAHATAN ARU JAYA 21 (250)	PENANGKAP	Jaring Hela Udang Berkantong	Samudra Mas Gruo, PT	Pemilik	Tarmizi Renhoat	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Mengoperasikan alat tangkap jaring hela ikan berkantong yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimilikinya (Jaring Hela Udang Berkantong)	Denda Administratif	B.213/DJPSDKP /PW.110/IV/20 24	3 April 2024	4 April 2024	3 April 2024	516.000.000	Selesai
3	KM. MITRA UTAMA SEMESTA (GT. 289)	PENGANGKUT	-	Astri Wieta	Pemilik	Sumarlani	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	KP. Orca 06	melakukan Transshipment/menerima hasil tangkapan ikan dari kapal penangkap ikan yang bukan menjadi mitranya							
															555.600.000	

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Analisa kegiatan yang menunjang adalah Kegiatan pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh pengawas perikanan pada saat kedatangan terkait adanya dugaan penggunaan alat tangkap ganda dan akhirnya berhasil memberikan satu sanksi administratif. Pelaksanaan patroli pengawasan kelautan dan perikanan oleh kapal pengawas yang secara rutin dilaksanakan dalam mengawal ketaatan pada saat melaksanakan pengoperasian pasca terbitnya SLO. Kedua aktifitas tersebut menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan berjalan dengan baik saat pelaksanaan operasi maupun setelah kedatangan kapal perikanan.

b. IKU 10: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Formula :

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$$

- x_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;
 $x_{n..}$: Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;
 $n_{..}$: Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

Tabel 35 kriteria indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	60	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Selama Triwulan II tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap 222 dugaan pelanggaran SPKP menurut data pemantauan yang dilakukan oleh tim pusdal. Data dugaan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Pangkalan PSDKP Tual dengan melakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda maupun pemilik. Berikut hasil tindak lanjut tersebut kami sampaikan dalam bentuk tabel.

Tabel 36 Rekapitulasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)							ANALISIS LANJUTAN			TINDAK LANJUT					
		PELABUHAN PANGKALAN	Transhipment	DPI	JALUR (<12NM)	IZIN HABIS			JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	BAP/ SURAT PANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA	PIDANA
						<30 HARI	>30 HARI	TOTAL									
1	PANGKALAN PSDKP TUAL	15	8	5	204				232	10	222	185	20	17			

$$x = \frac{222}{232} \times 100\% = 0,956 \times 100\% = 95,6\% (80 \text{ Baik})$$

$$\text{Capaian IKU 10} = \frac{tw I + tw II}{2} = \frac{40 + 80}{2} = \frac{120}{2} = 60$$

Tabel 37 Capaian IK 10

Indikator Kinerja				Target		Realisasi			
				TW 2	2024	TW I	TW II	s/d	TW II
						2024	2024	TW II	2023
Indeks	Pemeriksaan	Hasil	Analisis	50	80	40	60	80	-
Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)									

Analisis penyebab keberhasilan disebabkan antara lain:

1. Pangkalan PSDKP Tual menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Pangkalan PSDKP Tual menyurati UPT Pangkalan PSDKP lainnya yang merupakan tempat dimana pemilik kapal terindikasi melakukan pelanggaran berdomisili. Surat tersebut dimaksudkan agar Pangkalan PSDKP Tual mendapatkan bantuan dari UPT PSDKP lainnya sebagai mediator agar kegiatan BAP dapat dilaksanakan.

Walaupun target yang dicapai terbilang kecil akan tetapi capaian tersebut sudah sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan indikator kinerja ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan keterbatasan wilayah kerja dari Pangkalan PSDKP Tual dan lokasi kapal dan pemilik yang terindikasi melakukan pelanggaran di luar daya jangkau Pangkalan PSDKP Tual. Keterlibatan UPT lain juga sangat membantu walaupun sebenarnya belum bisa berjalan dengan optimal mengingat tidak tercapainya waktu yang ideal bagi kedua belah pihak melakukan BAP dikarenakan perbedaan waktu dan UPT PSDKP lainnya juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Analisa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindaklanjut kapal yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Mengingat dugaan pelanggaran setiap harinya terus bertambah maka berdasarkan evaluasi internal maka Pangkalan PSDKP Tual secara kontinu terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun menyurat kepada UPT PSDKP lainnya agar membantu sebagai mediator terlaksananya proses BA permintaan keterangan.

6. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kinerja ini menurunkan 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual dalam perjanjian kinerja Tahun 2024. 14 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 14 indikator kinerja tersebut antara lain

1. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
2. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%);
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
4. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
5. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
7. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
8. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi);
9. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
11. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
14. Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;

Selama kurun waktu hingga Triwulan II Pangkalan PSDKP Tual melakukan penilaian terhadap 4 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu point 2, 4, 6, 9, 10, dan 13.

a. IKU 13: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Pangkalan PSDKP Tual **sebesar 100 dari target 100 pada Triwulan II tahun 2024**. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Pangkalan PSDKP Tual telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 38 Capaian IK 13

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I 2024	TW II 2024	s/d TW II	TW II 2023
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100	100

$$\text{Capaian IKU 13} = \frac{9}{9} \times 100 = 100$$

$$\text{Capaian IKU 13} = \frac{tw I + tw II}{2} = \frac{100 + 100}{2} = \frac{200}{2} = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

b. IKU 15: Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Tujuan dari indeks profesionalitas ASN adalah untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Manfaat dari IP ASN antara lain;

- Digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai ASN;
- Digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional;
- Digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal dan non klasikal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual, maka sumber data berasal dari ropeg.kkp.go.id, dimana riwayat pendidikan dan kepegawaian ASN

telah direcord dan akan dikonversi serta diakumulasikan dengan nilai pengembangan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kegiatan dan sertifikat diklat 20 JP. Berikut kami sajikan capaian indikator kinerja IP ASN Pangkalan PSDKP Tual.

Tabel 39 Capaian IK 14

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I 2024	TW II 2024	s/d TW II	TW II 2023
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	77	82	-	83,09	83,09	81,52

Capaian indikator kinerja ini mengalami kenaikan dengan capaian TW II tahun sebelumnya, adapun **Analisa penyebab keberhasilan** capaian ini adalah:

1. Mengkomunikasikan dan mendelegasikan semua staff Pangkalan PSDKP Tual agar terlibat pada kegiatan yang mendukung dan memperbaiki kompetensi pegawai, baik secara daring maupun luring;
2. Melibatkan pimpinan dalam controlling peningkatan IP ASN yang esensinya adalah memenuhi kebutuhan pegawai dalam meningkatkan kapasitas diri dengan diklat 20 JP;
3. Kesadaran yang semakin tinggi ASN Pangkalan PSDKP Tual dalam meningkatkan kompetensi dengan mengikuti diklat 20 JP untuk pengembangan SDM.

Analisa kegiatan yang menunjang antara lain adanya kegiatan monitoring yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau capaian indikator kinerja IP ASN, hasil capaian kemudian didata siapa pegawai yang belum melaksanakan hak dan kewajibannya untuk melaksanakan pengembangan SDM berupa keikutsertaan dalam diklat 20 JP yang disampaikan melalui WAG maupun ketika kegiatan apel.

c. **IKU 17: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan**

Sebagai bentuk pengawasan dari APIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP maka telah dirumuskan IK "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan UPT PSDKP Tual yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan". Selama Triwulan II Pangkalan PSDKP Tual tidak memiliki rekomendasi hasil yang harus ditindaklanjuti, Sehingga capaian Pangkalan

PSDKP Tual untuk indikator kinerja dimaksud adalah 80. Perhitungan capaian pertriwulan merupakan rata-rata capaian setiap triwulan yang dirata-ratakan.

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Capaian ini telah sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan sebagaimana kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 40 Capaian IK 17

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I	TW II	s/d	TW I
			2024	2024	TW II	2023
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%	80%	80%	80%	80%	100%

$$\text{Capaian IKU 17} = \frac{tw I + tw II}{2} = \frac{80 + 80}{2} = \frac{160}{2} = 80$$

Analisa penyebab keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindaklanjut sudah diselesaikan.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

d. IK 20: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual.

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual; Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Formula:

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

$$x_{ikm} = x_1$$

x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024, Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 100 dari target 80. **Pencapaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Pangkalan PSDKP Tual serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.** Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 41 Capaian IK 20

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I 2024	TW II 2024	s/d TW II	TW II 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	80	80	100	100	100	89,47

$$\text{Capaian IKU 20} = \frac{tw I + tw II}{2} = \frac{100 + 100}{2} = \frac{200}{2} = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

e. IKU 21: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- o Keikutsertaan: Pimpinan UPT Pangkalan PSDKP Tual, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja;
- o Keaktifan: Pimpinan UPT Pangkalan PSDKP Tual, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi coffee dengan target 94% pada Triwulan II Tahun 2024. Capaian IK Pangkalan PSDKP Tual sebesar 133,33%. Perhitungan capaian Persentase unit kerja Pangkalan PSDKP Tual yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan II Tahun 2024 mengadopsi perhitungan data yang diberikan oleh Eselon I. Capaian pada Triwulan II Ini sangat optimal dan memenuhi unsur 5w1h, hal ini dikarenakan keaktifan akun coffee dipantau secara berkala dengan memberikan notes atas serangkaian kegiatan yang memenuhi kriteria agar dapat diposting. Berikut kami sajikan data capaian dalam bentuk tabel.

Tabel 42 Capaian IK 21

Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
	TW II	2024	TW I	TW II	s/d TW	TW I
			2024	2024	II	2023
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	94%	94%	133,33%	133,33%	133,33%	99,26%

$$\text{Capaian IKU 21} = \frac{tw I + tw II}{2} = \frac{133,33 + 133,33}{2} = \frac{266,66}{2} = 133,33$$

Analisa keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain:

- Mendukung pencapaian indeks kinerja dengan melakukan monitoring keaktifan internal oleh operator Coffice yang diinformasikan melalui WAG agar ditindaklanjuti oleh pemegang akun;
- Memberikan catatan atas kegiatan yang telah terlaksana lingkup Pangkalan PSDKP Tual baik kegiatan teknis maupun majerial agar history kegiatan dapat dituangkan ke dalam aplikasi coffice;
- Keterlibatan pimpinan yang aktif dalam memantau dan memacu keaktifan pemegang akun untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IK ini adalah

- Keaktifan Pangkalan PSDKP Tual dalam berpartisipasi dalam kegiatan eksternal dalam mendukung kinerja organisasi;
- Melaksanakan kegiatan internal yang aktif dalam mendukung capaian kinerja.

f. IKU 24: Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA triwulan II tahun 2024 sebesar 82 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;

- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. **Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual mendapatkan nilai IKPA sebesar 86,53.**

Analisa keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain:

- Menghindari keterlambatan saat revolving GUP maupun TUP;
- Meminimalisir keterlambatan pendaftaran kontrak;
- Menghindari adanya retur SP2D dengan meminimalisir kesalahan dalam penginputan;

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IK ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memitigasi keterlambatan dalam proses pengelolaan keuangan baik pada Pangkalan PSDKP Tual maupun satwas atau wilker yang telah ditetapkan BPP.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440853/2024 tanggal 24 November 2023, mendapat alokasi dana sebesar Rp70.706.563.000,- dengan pagu RM sebesar Rp36.254.204.000 dan pagu PNBP sebesar Rp34.452.359.000. Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024 Pangkalan PSDKP Tual telah memiliki realisasi sebesar Rp13,696,631,691,- atau 19,37% berdasarkan data OMSPAN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, kinerja Pangkalan PSDKP Tual telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual. Pencapaian IKU Triwulan II tahun 2024 dengan nilai NKO sebesar 108,85. Selama kurun waktu Triwulan II UPT Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan penilaian terhadap 14 Indikator Kinerja. 5 IK biru (istimewa) 9 IK lainnya berstatus hijau (baik).

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Pangkalan PSDKP Tual pada periode Triwulan III Tahun 2024. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2024 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 43 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Tahun 2024

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan kontrol terhadap penerapan sistem manajemen pengetahuan terstandar	<ul style="list-style-type: none">Mengadakan kroscek terhadap capaian coffee Pangkalan PSDKP Tual	<ul style="list-style-type: none">Triwulan III



**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

Jalan bukit Dumar No.1 Komplek PPN TUAL Kotamadya Tual 97651